



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS HUBUNGAN BELANJA MODAL DAN
BELANJA PEMELIHARAAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SUMATERA SELATAN**

TESIS

**LEGIANTO
0806430222**

**FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2010**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Legianto

NPM : 0806430222

Tanda Tangan : 

Tanggal : 08 Januari 2010

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

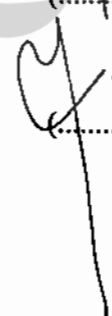
Nama : Legianto
NPM : 0806430222
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : **ANALISIS HUBUNGAN BELANJA MODAL DAN BELANJA PEMELIHARAAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN**

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2010 pukul 18³⁰ – 21⁰⁰ WIB dan Diterima Sebagai Bagian Persyaratan yang Diperlukan untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ir. Widyono Soetjipto, M.Sc. (.....) 

Pembimbing : Benedictus Raksaka Mahi, S.E., M.Sc., Ph.D (.....) 

Penguji : Syarif Syahril, S.E., M.S.E. (.....) 

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 8 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Benedictus Raksaka Mahi, S.E., M.Sc., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran di dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Bappenas RI yang telah memberikan beasiswa kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
3. Iman Rozani, S.E, M.Soc.Sc. dan Syarif Syahrial, S.E., M.S.E. selaku penguji sidang Tesis dan Komprehensif, Arindra A. Zainal, Ph.D dan jajaran dosen Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
4. Ir. H Ishak Mekki, M.M. sebagai Bupati Ogan Komering Ilir yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis untuk mengeksplorasi praktik dan komitmen kepemimpinannya dalam pengumpulan data di tengah-tengah aparat dan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Istriku tersayang, Siti Muslikah, S.T. dan buah hati terkasih : Muhammad Alif Mubarak dan Muhammad Fariz Uqail, yang telah memberikan dukungan moril melalui kekuatan cinta.
6. Bunda dan Ayahanda yang telah memberikan dukungan moril dan doanya.
7. Para Informan yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara.

8. Sahabat-sahabat angkatan XIX PB yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan sekitar setahun lebih. Dengan kebersamaan kita bisa membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan untuk kemaslahatan ummat manusia.

Depok, 8 Januari 2010



Legianto

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
(Hasil Karya Perorangan)**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Legianto
NPM/NIP : 0806430222
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah
Jenis karya : Tesis

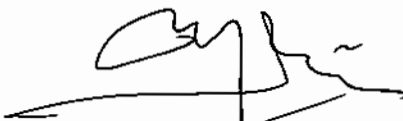
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS HUBUNGAN BELANJA MODAL DAN BELANJA
PEMELIHARAAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SUMATERA SELATAN**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 08 Januari 2010
Yang menyatakan,


(Legianto)

ABSTRAK

Nama : Legianto
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Kekhususan
Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah
Judul Tesis : **ANALISIS HUBUNGAN BELANJA MODAL DAN
BELANJA PEMELIHARAAN DAERAH**
(Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Propinsi Sumatera Selatan)
xii + 59 halaman + 11 tabel + 2 gambar

Infrastruktur merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Secara makro, infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital* dan secara mikro, infrastruktur mempengaruhi biaya produksi. Dalam keuangan negara & daerah belanja infrastruktur dikelompokkan dalam jenis Belanja Modal. Alokasi belanja modal memiliki konsekuensi meningkatnya belanja pemeliharaan di tahun anggaran ke depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemeliharaan, dan hubungannya dengan belanja modal serta bagaimana pengalokasian belanja pemeliharaan.

Sebagai sebuah penelitian kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif, penulis menganalisa realitas dan membandingkannya dengan teori yang ada. Data yang diolah adalah data keuangan dengan alat analisis *correlation matrix* yang dipadukan dengan observasi data dokumen dan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja pemeliharaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, alokasi belanja modal tahun sebelumnya, metode penghitungan belanja pemeliharaan, dan jumlah aset yang ada. Belanja pemeliharaan juga memiliki hubungan yang kuat terhadap belanja modal tahun sebelumnya. Koefisien korelasi tertinggi ditunjukkan oleh hubungan belanja pemeliharaan dengan belanja modal satu tahun sebelumnya yakni sebesar 0,94. Besaran alokasi belanja pemeliharaan menggunakan metode *actual expenditure*.

Ke depan, sebaiknya pemerintah mulai menerapkan konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) dalam pengalokasian belanja modal dan belanja pemeliharaan, mulai dari *planning, executing, monitoring, dan evaluating*. Pemerintah juga sudah harus mulai menerapkan sistem akumulasi penyusutan dalam menghitung neraca daerah sehingga aset yang tercantum dalam neraca daerah lebih realistis.

Kata kunci : Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal daerah.

ABSTRACT

Name : Legianto
Study Program : Masters in Planning and Public Policy, spesificity State and Local Finance
Thesis Title : **THE RELATIONSHIP ANALYSIS OF CAPITAL AND MAINTENANCE EXPENDITURE IN OGAN KOMERING ILIR REGION OF SOUTH SUMATRA**
xii + 59 pages + 11 table + 2 pictures

Infrastructure is the engine of economic growth. On the Macroeconomics, infrastructure affecting the marginal productivity of private capital and microeconomics, infrastructure affect production costs. In the state and local finance infrastructure expenditures are grouped in this type of Capital Expenditures. Allocation of capital expenditures have increased consequences of maintenance expenditures in the next budget year.

This study aims to determine the factors that affect the maintenance expenditure, and its relation to capital expenditure and how the allocation of maintenance expenditure.

As a quantitative research supported by the qualitative approach, the authors analyze the reality and compare it with existing theories. The data is processed financial data with the correlation matrix analysis tools combined with observational data and theoretical documents.

The results showed that the allocation of maintenance expenditure is influenced by several factors namely, the allocation of the previous year capital expenditure, maintenance expenditure method of calculation, and the amount of existing assets. Maintenance expenditures also have a strong relationship to the previous year capital expenditure. The highest correlation coefficient indicated by the relations of maintenance expenditures with capital expenditure of the previous year for 0.94. Maintenance expenditure allocation quantities using actual expenditure.

For the future, the government should begin to apply the concept of multi-term expenditure framework (MTEF) in the allocation of capital expenditure and maintenance expenditure, ranging from planning, executing, monitoring, and Evaluating. The government also must begin to implement the system in calculating accumulated depreciation balance of the region so that the assets listed in the regional balance is more realistic.

Main words : Maintenance and capital expenditure.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan & Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Acuan Klasifikasi Belanja Modal & Belanja Pemeliharaan.....	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Belanja Modal.....	11
2.1.1. Pengertian Belanja Modal.....	11
2.1.2. Pengelompokan & Perolehan Belanja Modal	11
2.2. Belanja Pemeliharaan	14
2.2.1. Pengertian Belanja Pemeliharaan.....	14
2.2.2. Tujuan Utama Kegiatan Pemeliharaan.....	15
2.2.3. Jenis- Jenis Pemeliharaan	15
2.2.4. Klasifikasi Biaya Pemeliharaan	16
2.2.5. Estimasi & Pengendalian Biaya Pemeliharaan	17
2.3. Hasil Kajian Terdahulu	19
3. GAMBARAN UMUM	21
3.1. Profil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	21
3.2. Profil Belanja Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	26
3.2.1. Kenaikan Tertinggi Belanja Modal	26
3.2.2. Penurunan Terendah Belanja Modal	28
3.3 Profil Belanja Pemeliharaan	31
4. METODE PENELITIAN	33
4.1. Metode Penelitian	33
4.2. desain Penelitian	33
4.3. Teknik Pengumpulan Data	34
4.4. Lokasi Penelitian & Sumber Data.....	34
4.5. Keterbatasan Penelitian.....	35

4.6. Analisis Data.....	36
5. PEMBAHASAN.....	38
5.1. Konsepsi Ekonometrika	38
5.2. Hasil Pengolahan Koefisien Korelasi	39
5.3. Analisis Hasil Koefisien Korelasi.....	41
5.3.1. Analisis Belanja Modal	41
5.3.2. Analisis Belanja Pemeliharaan.....	47
5.3.3. Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan	55
6. KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
6.1. Kesimpulan.....	57
6.2. Saran.....	58
DAFTAR REFERENSI.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Belanja Modal dan Pemeliharaan	7
Tabel 3.1. Kondisi Jalan Kabupaten OKI.....	25
Tabel 3.2. Perkembangan Belanja Modal.....	26
Tabel 3.3. Komposisi Belanja Modal.....	31
Tabel 3.4. Perkembangan Belanja Pemeliharaan.....	32
Tabel 5.1. Matrik Hasil Koefisien Korelasi.....	40
Tabel 5.2. Persentase Belanja Modal.....	42
Tabel 5.3. Persentase Komposisi Belanja Modal.....	43
Tabel 5.4. Komposisi & Urutan Belanja Modal.....	44
Tabel 5.5. Persentase Belanja Pemeliharaan.....	47
Tabel 5.6. Perbandingan Kenaikan Belanja Modal & Pemeliharaan.....	48
Tabel 5.7. Aset Fasilitas Kesehatan	52

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Infrastruktur merupakan lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga dipandang sebagai penggerak pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro, ketersediaan jasa layanan infrastruktur akan mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan secara ekonomi mikro, ketersediaan jasa layanan infrastruktur akan berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Mustajab, 2009).

Karena begitu besarnya peran infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan yang dimanifestasikan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Aschaur (1989) dan Munnell (1990) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 60% (Dikun, 2003). Bahkan, world Bank (1994) juga melakukan studi yang menyebutkan bahwa elastisitas Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap infrastruktur di suatu negara antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti, apabila ketersediaan infrastruktur suatu negara meningkat sebesar 1 % saja, maka akan menimbulkan pertumbuhan PDB sebesar 7 % sampai dengan 44 %. Secara praktis, ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun mikro dari suatu negara atau wilayah.

Pemerintah Indonesia pun, dalam rangka mencegah perlemahan ekonomi yang lebih parah akibat dampak negative krisis keuangan global, dalam tahun 2009 menerapkan kebijakan counter cyclical dalam bentuk stimulus fiskal yang ditujukan untuk 3 (tiga) hal yang salah satunya adalah kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya untuk menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Besaran anggarannya pun tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar Rp. 17 triliun.

Dalam peraturan per-UUaan alokasi pembiayaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dikelompokkan ke akun belanja modal baik dalam APBN maupun APBD. Penggunaan penyebutan belanja modal ini dikenal setelah

adanya reformasi keuangan public sejak adanya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dengan berlakunya UU tersebut, juga berimplikasi pada pengelolaan sistem keuangan daerah yang sudah mulai mengadopsi sistem anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dan sistem akuntansi anggaran berdasarkan *accrual bases* (Syahrudin. 2007). Pemerintah sendiri telah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yakni PP nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Untuk menindaklanjuti PP tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan lagi dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baru ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki ke belanja-belanja daerah yang dalam penerapannya tetap menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD menentukan arah kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran sebagai panduan dalam mengalokasikan sumber daya dalam APBD. AKU dan prioritas anggaran merupakan rumusan dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk APBD sebagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Rumusan tersebut memberikan gambaran kebijakan keuangan jangka pendek (tahunan) dan jangka menengah (lima tahunan) yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk belanja daerah.

Sementara PP 58 Tahun 2005 dalam Bagian Keempat Pasal 26 dan 27, menjelaskan bahwa belanja daerah ditujukan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi urusan yang berhubungan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga urusan wajib ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan social. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pemerintahan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan akan jasa public dan layanan public (Ndraha, 2003), memerlukan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam mewujudkan apa yang disebut dalam PP nomor 58 tahun 2005 sebagai urusan wajib dan urusan pilihan. Infrastruktur, sarana dan prasarana baik yang berupa tanah, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, peralatan dan mesin, telah diklasifikasikan tersendiri dalam PP nomor 58 tahun 2005 pasal 27 ayat 7 yaitu jenis belanja modal.

Belanja modal ini sebagai jenis pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan / pembelian asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai umur manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Belanja modal ini juga dapat diartikan sebagai pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya pengeluaran yang menambah masa manfaat dan meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Sementara, Allen dan Tommasi (2001) memberikan penjelasan lebih jauh bahwa, belanja modal memiliki dampak terhadap perencanaan pengelolaan keuangan yang berdimensi jangka panjang sebab belanja modal akan menimbulkan biaya pemeliharaan terhadap asset tetap. Konsep *multi-term expenditure framework* menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus mempertimbangkan unsur manfaat dan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola asset untuk beberapa tahun anggaran ke depan.

Sedangkan Halim (2004), memberikan pengertian belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah serta menimbulkan konsekuensi meningkatkannya belanja rutin berupa belanja pemeliharaan. Untuk memperoleh asset dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan asset lain, dan

membeli (Abdullah, 2006).

Kamensky (1984) dalam makalahnya, "*budgeting for State and Local Infrastructure*," memberikan penjelasan bahwa, 57 % kota di AS tidak mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan perbaikan atas siklus hidup dari suatu proyek infrastruktur. Kamensky juga menggaris bawahi bahwa manajer publik atau kepala daerah kalau di Indonesia, harus memahami lebih jauh biaya total belanja modal bukan hanya pengeluaran untuk konstruksi dan pengadaan saja, tetapi juga mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan perbaikan atas asset yang akan diperolehnya.

Sementara memperhatikan peran dan posisi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang strategis dilihat dari sudut jalur Trans Sumatera yang memanjang sepanjang 2.700 km mulai dari Aceh sampai Lampung, atau yang dikenal dengan Jalan Raya Lintas Timur. Jalur Trans Sumatera ini melintasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga jantung ibukota Kabupaten, Kayuagung. Jalur ini memperpendek waktu jarak tempuh sekitar 6-7 jam dibanding melintasi jalur Lintas Tengah. Jalan Raya Lintas Timur berpotensi menggerakkan ekonomi yang diantaranya memicu pertumbuhan ekonomi di sektor sawit, minyak, dan gas.

Menyadari peran pentingnya Kabupaten Ogan Komering Ilir, pemerintah kabupaten ini telah mengalokasikan dana belanja modal selama tahun 2003 samapai dengan 2009 sebesar Rp. 1,3 trilyun atau rata-rata per tahun dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp. 187 milyar atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 19,26 %. Sedangkan belanja pemeliharaan selama 7 tahun terakhir sebesar Rp. 478 milyar atau rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 25,58 % atau sebesar Rp. 68 milyar per tahun.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan yakni sebagai penyedia layanan publik dan jasa public (Ndaraha. 2003), Pemerintah daerah memerlukan sarana dan prasarana diantaranya asset tetap. Untuk memperoleh dan meningkatkan asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan

maupun untuk fasilitas layanan publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang yang diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Sepengetahuan penulis telah diubah ketujuh dengan Peraturan Presiden RI nomor 95 tahun 2007.

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003) juga menyatakan menyatakan hal senada. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (Bland & Nunn, 1992).

Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam penghitungan biaya depresiasi aset tetap. Artinya, jika suatu aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun, pun jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester.

Alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti

bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobiler), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

Berbeda dengan belanja modal, belanja pemeliharaan terjadi pada semua satuan kerja atau unit organisasi pemerintah daerah karena semua memiliki aset tetap. Karena bersifat rutin, belanja pemeliharaan tidak tergantung pada Tupoksi satuan kerja, tetapi pada jumlah aset yang dimiliki.

Belanja modal berbeda dengan belanja pemeliharaan dalam hal pembuatan keputusan. Anggaran pemeliharaan melibatkan para eksekutif, bagian anggaran, dan pimpinan dinas, badan, bagian, dan kantor, sementara belanja modal, terutama infrastruktur sangat tergantung pada masukan dari insinyur, arsitek, dan perencanaan. Di sisi lain pembiayaan untuk kedua anggaran tersebut juga berbeda. Belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (*fund*), sedangkan pendanaan untuk belanja pemeliharaan cenderung bersumber dari pendapatan, misalnya biaya pelayanan (*service charges*) dan pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Perbedaan yang lain adalah anggaran pemeliharaan biasanya dirancang untuk satu tahun belanja, sementara anggaran modal untuk beberapa periode atau tahun anggaran (Bland dan Nunn, 1992).

Sementara mengamati hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama tahun 2003 sampai dengan 2009, dimana penulis bertugas, memberikan gambaran bahwa peningkatan belanja modal dan belanja pemeliharaan yang kecenderungannya seimbang. Belanja modal rata-rata meningkat 19,26 % per tahun, sedangkan belanja pemeliharaan rata-rata meningkat 25,58 % per tahun. (Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.1. di bawah ini).

Tabel 1.1.
Perkembangan Belanja Modal dan Pemeliharaan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2003 – 2009
(Rp. juta)

Tahun	Modal	%	Pemeliharaan	%
2003	90,886	-	27,457	-
2004	130,174	43.23	35,523	29.38
2005	149,367	14.74	54,411	53.17
2006	201,171	34.68	75,547	38.85
2007	236,701	17.66	85,547	13.24
2008	240,734	1.70	98,041	14.60
2009	249,223	3.53	102,223	4.27
	1,298,256	19.26	478,749	25.58

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. OKI &
Dinas PKAD Kabupaten OKI (data diolah)

Mengamati data asset yang ada di kabupaten ini, sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan belanja pemeliharaan, dalam hal ini bidang layanan dasar public kesehatan dan pendidikan. Data asset Dinas Kesehatan pada tahun 2006, menunjukkan bahwa belanja pemeliharaan tidak dilaksanakan secara baik dan terkontrol sesuai tujuan adanya belanja pemeliharaan. Hal ini terbukti bahwa asset fasilitas layanan dasar kesehatan masyarakat yang dalam kondisi baik dan siap pakai hanya sebesar 55 % untuk fasilitas puskesmas, untuk puskesmas pembantu lebih kecil lagi yakni sebesar 42% yang kondisi siap melayani masyarakat, serta untuk puskesmas keliling sebesar 55 % dalam kondisi baik (lihat table 1.2.).

Kondisi layanan dasar public lain, misalnya di bidang pendidikan juga memprihatinkan, sarana dan prasarana belajar seperti gedung dan ruang belajar hanya 49,13 persen yang kondisi baik dan layak pakai, belum lagi sarana penunjang proses pembelajaran seperti laboratorium dan perpustakaan.

Dengan pemahaman dan kondisi lapangan yang telah dijelaskan tersebut, penulis mencoba ingin menggali lebih lanjut permasalahan-permasalahan tersebut dan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul Analisis Hubungan antara Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan dengan studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

Tabel. 1.2.
Data Fasilitas Kesehatan
Kabupaten OKI tahun 2006

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Kondisi Baik
1.	Puskesmas	20	55 %
	- Kondisi Baik	11	
	- Kondisi Rusak	9	
2.	Puskesmas Pembantu	88	42 %
	- Kondisi Baik	37	
	- Kondisi Rusak	51	
3.	Puskesmas Keliling	11	55 %
	- Kondisi Baik	6	
	- Kondisi Rusak	5	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2006 (data diolah)

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi belanja Pemeliharaan.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana hubungan belanja modal terhadap belanja pemeliharaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. Untuk mengetahui sejauhmana belanja pemeliharaan dialokasikan secara efektif dan efisien dalam anggaran.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan atau referensi bagi peneliti lain dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, serta dapat memberikan manfaat yang luas bagi para pemangku kepentingan dalam rangka merumuskan kebijakan public yang terkait dengan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

1.4. Acuan Klasifikasi Belanja Modal & Belanja Pemeliharaan

Mencermati struktur APBD mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2009, yang mengalami perbaikan secara terus-menerus, maka perlu dibuat acuan terutama komponen belanja modal dan belanja pemeliharaan yang menjadi fokus penelitian ini. Acuan yang penulis gunakan adalah PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikeluarkan tanggal 13 Juni 2005, dan mulai diberlakukan di Indonesia. Walaupun, ada beberapa daerah dalam pengelolaan keuangannya mengacu pada praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum di sector pemerintahan. Begitupun juga pemerintahan Kabupaten Ogan

Komering Ilir sudah mencoba menerapkan system pengelolaan yang mengacu praktek-praktek pengelolaan keuangan yang baik dengan bekerjasama dengan BPKP Wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Terlebih lagi selama rentang waktu tersebut banyak peraturan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik menteri dalam negeri maupun menteri keuangan. Peraturan yang dikeluarkan pun ada yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya.

Dengan demikian penulis mengacu PP No. 24 Tahun 2005 dalam mengklasifikasikan belanja modal dan pemeliharaan. Untuk itu, perlu penyesuaian ke dalam PP tersebut, terutama sebelum PP tersebut dikeluarkan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Pengamatan dilakukan terhadap semua badan/dinas/ instansi dan kantor yang memiliki data atas variable-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai tahun 2003 hingga 2008, sementara untuk tahun 2009 menggunakan data anggaran perubahan.
- c. Realisasi pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum mulai tahun 2003 hingga 2008, sedangkan untuk tahun 2009 menggunakan data anggaran perubahan 2009.
- d. Realisasi belanja modal dan pemeliharaan disesuaikan dengan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga mulai tahun 2003 hingga 2007 perlu dilakukan rekomposisi belanja-belanja ke dalam kelompok belanja yang telah ditetapkan dalam PP 24 tahun 2005.

1.6. Sistematika penulisan

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan dan kerangka pikir.

- Bab II : Tinjauan Pustaka**
Bab ini berisi tinjauan atas konsepsi belanja modal dan belanja pemeliharaan, dan hasil penelitian terdahulu
- Bab III : Gambaran Umum**
Bab ini berisi tentang gambaran umum perkembangan belanja modal dan belanja pemeliharaan di kabupaten Ogan komering ilir.
- Bab IV : Metode Penelitian**
Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, Desain Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi & Sumber Data, Keterbatasan, dan Analisis Data
- Bab V : Pembahasan**
Bab ini membahas konsepsi ekonometrika, hasil estimasi model, dan analisis hasil estimasi model
- Bab VI : Penutup**
Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Belanja Modal

2.1.1. Pengertian Belanja Modal

Capital Expenditure sering diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai belanja modal. Vogt (2007) menjelaskan bahwa belanja modal memiliki dua definisi. Definisi dari sudut pandang ekonomi dan dari sudut pandang akuntansi.

Sudut pandang ekonomi memberikan konsep belanja modal yang lebih luas, yakni setiap pengeluaran yang akan menghasilkan manfaat di masa yang akan datang disebut belanja modal. Termasuk pengeluaran iklan untuk menarik investor baru, yang akan menghasilkan manfaat di beberapa tahun kemudian. Walaupun tidak semua ekonom sepakat dengan definisi ini seperti Baumol dan Blinder (2005) dalam Vogt (2007).

Sedangkan sudut pandang akuntansi, belanja modal merupakan pengeluaran yang tidak hanya menghasilkan manfaat di masa mendatang, tetapi juga menghasilkan perolehan, menambah, atau meningkatkan asset yang telah ada yang masa ekonomisnya panjang. Bahkan, kalau menurut *Government Accounting Standards Board's Statement 34 (1999) of United State*, belanja modal yang nilainya kurang dari \$ 5.000 dianggap sebagai pengeluaran rutin atau pengeluaran operasional. Definisi akuntansi inilah yang umum digunakan dalam keuangan negara dan daerah (Vogt. 2007).

Di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 58 Tahun 2005 tersebut mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

2.1.2. Pengelompokan dan Perolehan Belanja Modal

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, belanja modal dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama, yaitu :

- a. Belanja modal tanah. Pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan / penyelesaian, balik nama, dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin, adalah pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal, termasuk di dalamnya biaya untuk penambahan, penggantian dan peningkatan kualitas peralatan dan mesin.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan, adalah pengeluaran yang diperlukan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan, termasuk di dalamnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jaringan, adalah pengeluaran yang diperlukan untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan, serta perawatan sarana dan prasarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan seperti jalan, jembatan, irigasi, listrik, dan jaringan.
- e. Belanja modal fisik lainnya, adalah pengeluaran yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal dalam bentuk asset fisik lainnya, seperti buku, binatang, dan lain-lain yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi belanja modal di atas. Contoh belanja ini misal, belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenia, barang purbakala dan barang museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja modal akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, dimana khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengeluaran atas belanja modal tersebut diakui sebagai asset tetap dalam neraca daerah. Asset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Asset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian awal asset tetap barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu asset dan dikelompokkan sebagai asset tetap. Pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehannya. Bila asset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya asset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat perolehan asset tersebut. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan asset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan asset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak diketahui.

Biaya perolehan suatu asset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea import dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut ke kondisi yang membuat set tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud. Belanja modal yang dilaksanakan secara swakelola dan memiliki output berupa asset tetap, seluruh pengeluaran termasuk upah, perjalanan dinas, dan bahan-bahan/asistensi dan komponen biaya tersebut di atas diakui sebagai nilai perolehan aset tetap.

Apabila pembangunan dan perolehan terhadap asset tetap tidak bersifat final dan berkelanjutan dimana harus ada keseimbangan antara arus uang dan arus barang, maka menurut standar perlu ada perkiraan untuk melakukan pencatatan tersebut. Perkiraan yang dimaksud adalah konstruksi dalam pengerjaan yang terjadi karena belanja modal yang dikeluarkan untuk tujuan pembentukan barang modal yang masa pembangunannya belum selesai sampai pada saat tanggal pelaporan keuangan. Penyajian perkiraan dimaksud diikuti dengan memberikan penjelasan di dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian perkiraan konstruksi dalam pengerjaan ini dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan semester dan tahunan.

2.2. Belanja Pemeliharaan

2.2.1. Pengertian Belanja Pemeliharaan

Untuk mengetahui dan memahami konsep belanja pemeliharaan, terlebih dahulu perlu dijabarkan tentang pengertian pemeliharaan itu sendiri. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pemeliharaan yang pada dasarnya memiliki arti yang hampir sama.

Menurut British Standart (1984 dan 1993), kegiatan pemeliharaan didefinisikan sebagai berikut. Pemeliharaan adalah gabungan kegiatan, baik dari awal pemunculan ide, kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, organisasi maupun kegiatan fisik pemeliharaan itu sendiri yang dilakukan untuk menjaga ataupun mempertahankan sesuatu barang pada kondisi yang semestinya sesuai dengan persyaratan.

Sedangkan *The Committee on Building Maintenance* mendefinisikan kegiatan pemeliharaan adalah, suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaharui dan juga memperbaiki semua fasilitas yang ada sebagai bagian dari suatu bangunan, baik fasilitas layanan maupun lingkungan sekitar bangunan agar tetap berada pada kondisi sesuai standar yang berlaku, dan mempertahankan kegunaan seta nilai dari bangunan tersebut.

Hammer, Carter, dan Usry (2000:331) mendefinisikan belanja pemeliharaan adalah, "*Most repair and maintenance cost generally are traceable to benefiting departments and often are classfield as direct department cost, even though they may originate in a maintenance department.*"

Mulyadi (2003) mendefinisikan, belanja reparasi dan perbaikan berupa biaya suku cadang, bahan habis pakai dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan, emplasmen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan perlengkapannya, kendaraan, perkakas laboratorium, dan aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk keperluan pabrik.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan yang perlu dilakukan untuk menjaga, dan mempertahankan kondisi asset/inventaris, beserta elemen, bahan dan peralatan di dalamnya sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai umur yang telah ditetapkan.

2.2.2. Tujuan Utama Kegiatan Pemeliharaan

Assuri (1993) menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan pemeliharaan adalah ;

1. Untuk menjamin kegiatan produksi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Karena dalam perspektif pemerintahan, tentu yang diproduksi di sini adalah layanan dasar public dan sejenisnya.
2. Untuk menjaga kualitas produk berada pada tingkat yang tetap.
3. Meningkatkan efisiensi dan biaya pemeliharaan
4. Untuk menjaga agar fasilitas peralatan yang dimiliki perusahaan dapat dipergunakan sesuai masa manfaat yang ditentukan.

2.2.3. Jenis-jenis Pemeliharaan

Menurut Assuri (1993), kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) dalam dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1. *Preventive Maintenance*

Adalah kegiatan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga terhadap mesin-mesin dan alat-alat. Jadi tindakan inidiambil sebelum suatu kerusakan terjadi. Fasilitas atau peralatan yang dipelihara secara preventive maintenance, diharapkan akan terjamin kelancaran kerja dan selalu diusahakan dalam kondisi atau keadaan yang siap untuk digunakan dalam setiap proses kerja.

Dalam prakteknya preventive maintenance dapat dibedakan dalam dua caram yaitu :

- a. *Routine Maintenance*, yaitu kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin, misalnya setiap hari kegiatan pemeliharaan yang dapat dikategorikan dalam jenis pemeliharaan ini adalah kebersihan fasilitas atau peralatan.
- b. *Periodic Maintenance*, adalah kegiatan pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya setiap bulan, setiap enam bulan dan sebagainya. Kegiatan pemeliharaan yang dapat dikategorikan dalam periodic maintenance antara lain, penggantian spareparts, overhaul dan lain-lain.

2. *Corrective Maintenance*

Adalah kegiatan perawatan atau pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan kelainan pada mesin atau fasilitas yang dimiliki. Maksud dilakukannya *corrective maintenance* adalah agar fasilitas atau mesin, sarana dan prasarana yang dimiliki dapat kembali berfungsi dengan baik. Akan tetapi, bila hanya mengandalkan *corrective maintenance* dalam kebijakan pemeliharaannya, maka akan terjadi ketidakpastian kelancaran fasilitas, sarana dan prasarana.

2.2.4. Klasifikasi Biaya Pemeliharaan

Klasifikasi biaya pemeliharaan untuk memberikan data pengendalian yang efektif dalam upaya mengendalikan anggaran pemeliharaan. Menurut Nakajima (1989) ada beberapa cara dalam mengklasifikasi biaya pemeliharaan yaitu:

1. Klasifikasi berdasarkan tujuan meliputi,
 - a. *Routine Maintenance Cost*, meliputi biaya tenaga kerja dan material yang digunakan dalam aktivitas maintenance yang dirancang untuk mencegah penurunan kinerja mesin, sarana dan prasarana seperti pembersihan, pelumasan, inspeksi dan penyesuaian
 - b. *Equipment Inspection Cost*, meliputi biaya tenaga kerja dan material yang digunakan dalam inspeksi untuk menemukan keabnormalan dan menentukan apakah suatu peralatan, sarana dan prasarana layak beroperasi atau tidak.
 - c. *Repair Cost*, meliputi biaya tenaga kerja yang digunakan dalam perbaikan untuk mengembalikan peralatan, sarana dan prasarana pada kondisi semula.

2. Klasifikasi berdasarkan metode maintenance, meliputi;
 - a. *Preventive Maintenance cost (PM)*
 - b. *Breakdown Maintenance*
 - c. *Maintability Improvement*

3. Klasifikasi berdasarkan elemen penyusunan, meliputi;
 - a. *Maintenance material cost*, meliputi, material yang digunakan untuk maintenance, suku cadang, material umum, alat-alat pertukangan dan sebagainya.
 - b. *In-House Cost*, meliputi biaya dari operator jika melaksanakan pemeliharaan otonom dan biaya pemeliharaan dari bagian maintenance.
 - c. *Subcontracting cost*, yaitu biaya maintenance yang dibayarkan kepada pihak kontraktor luar.
4. Metode Klasifikasi lain seperti.
 - a. *Scale of work*, seperti skala besar, proyek maintenance besar, pekerjaan kecil, dan sebagainya
 - b. *Type of Work*, seperti yang bersifat mekanis, kelistrikan, perpipaan dan sebagainya.

2.2.5. Estimasi dan Pengendalian Anggaran Pemeliharaan

Menurut Nakajima (1989) metode yang digunakan untuk mengestimasi anggaran pemeliharaan adalah sebagai berikut :

1. Estimasi berdasarkan *actual expenditure*

Disebabkan karena biaya pemeliharaan tidak terjadi peningkatan dan penurunan secara proporsional terhadap rasio operasi, maka biaya tersebut dapat diestimasi dengan basis *actual expenditure* dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam metode ini perubahan terhadap tingkat operasi dan kondisi serta anggaran diestimasi dengan menyesuaikan figure kenaikan atau penurunan tahun sebelumnya

2. *Repair-Cost Rate Method*

Dalam metode ini biaya dari peralatan dikalikan persentase maintenance yang dikalkulasikan dari pengeluaran-pengeluaran sebelumnya.

3. *Unit-Cost Method*

Dalam method ini, menggunakan grafik yang menghubungkan jumlah produksi, waktu operasi, listrik yang dikonsumsi atau variable lainnya dengan actual biaya reparasi. Grafik ini akan digunakan untk menghitung anggaran maintenance

4. *Zero-Base Method*

Ini merupakan method terpenting atas akumulasi tenaga kerja, material dan biaya maintenance lainnya. Anggaran maintenance diestimasi dengan mengulang setiap item dari peralatan pada rencana maintenance tahunan dan mengkalkulasikan jumlah material dan tenaga kerja yang dibutuhkan.

5. *Mixed Method*

Merupakan metode campuran dari keempat metode di atas. Dalam mewujudkan aktivitas pengendalian yang efektif, maka perlu adanya suatu pengendalian anggaran maintenance (*Maintenance budget control*). Ini bertujuan untuk mengendalikan aktivitas manajemen dalam mencapai target pada periode atau tahun fiscal yang bersangkutan.

Menurut Nakajima (1989), ini perlu diperhatikan dalam mewujudkan aktivitas pengeluaran yang efektif adalah :

- a. Ciptakan kondisi dimana setiap organisasi sadar akan kebutuhan untuk mengendalikan anggaran. Jelaskan anggaran dan rencana maintenance periode tahun ini kepada seluruh personil departemen maintenance dan pihak lain yang berkaitan. Kemudian berikan pengertian tentang trend keadaan industri, posisi perusahaan dalam industry, keinginan konsumen akan informasi lainnya.
- b. Monitor secara cermat pengeluaran maintenance, seiring dengan pengeluaran fiscal berjalan, revive status dari komitmen anggaran pengeluaran dalam interval teratur. Ciptakan system yang jelas untuk penerbitan, pengklasifikasian dan penjumlahan voucher pembayaran yang mengidentifikasi pengeluaran actual maintenance serta penerbit laporan dan catatan maintenance formal, sehingga status dari anggaran maintenance dapat dilakukan.
- c. Selesaikan masalah dengan efektif, tanggung jawab dalam mengendalikan anggaran manajemen harus tetap mencermati perkembangan maintenance tersebut. Gunakan metode ini untuk memonitor status dari penyimpangan total biaya maintenance, kemudian setelah mengidentifikasi penyimpangan tentukan sumber dan ambil tindakan perbaikan.

2.3. Hasil Kajian Terdahulu

Penulis sedikit sekali menemukan kajian tentang analisis dampak belanja modal terhadap belanja pemeliharaan terutama kajian yang berhubungan dengan pemerintahan Indonesia, apalagi pemerintahan daerah. Diantara kajian tersebut yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2006). Hasil kajian menemukan bahwa ada hubungan yang positif dan *robust* atau sangat kuat antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan. Artinya, belanja modal akan berdampak pada pengalokasian belanja pemeliharaan di masa-masa mendatang. Penelitiannya juga menguji hubungan antara dana perimbangan dan PAD dengan belanja modal, dan menghasilkan bahwa dana perimbangan memiliki hubungan yang positif terhadap belanja modal sementara PAD tidak.

Kajiannya menggunakan data tahun anggaran 2003 dan 2004 di 20 kabupaten dan 12 kota di pulau Sumatera termasuk Bangka-Belitung. Kajiannya merekomendasikan bahwa perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi tentang hubungan besaran asset tetap daerah terhadap pengalokasian belanja pemeliharaan, sebab dampak langsung belanja modal adalah bertambahnya asset tetap daerah yang disajikan dalam neraca daerah per tanggal akhir tahun anggaran. Besaran asset daerah inilah yang akan menentukan berapa besar pengalokasian belanja pemeliharaan. Rekomendasinya yang lain, adalah perlu dikaji lebih jauh tentang proses pengalokasian belanja modal dalam anggaran, sebab hal ini untuk memberikan bukti apakah belanja modal merupakan perwujudan dari kebijakan untuk menambah kapasitas asset, meningkat efisiensi, mengganti asset yang usang, rusak dan tidak ekonomis, atau pelaksanaan kebijakan padat karya (*labour intensive*) atau padat modal (*capital intensive*).

Studi lain mengenai hubungan belanja modal dan operasional dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Karo-Karo (2006), menemukan bahwa tidak terdapat korelasi di antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Dia menggunakan sampel kabupaten/kota di pulau Jawa untuk anggaran 2003-2004 dan juga menemukan bahwa ketika pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran belanja modal, tidak diiringi dengan pengalokasian untuk belanja operasional dan pemeliharaan yang seimbang. Diduga penyebabnya adalah tidak akuratnya pemerintah daerah dalam

mengalokasikan anggaran terhadap proyek/kegiatan. Namun, pengalokasian belanja secara signifikan berbeda untuk belanja aparatur daerah dan pelayanan publik, meskipun sesungguhnya kualitas keberpihakan pemerintah daerah kepada publik dengan didasarkan pada jumlah alokasi dalam belanja pelayanan publik masih perlu diperdebatkan.

Sedangkan kajian lain, yang dilakukan oleh Kamensky (1984) dalam makalahnya, "*Budgeting for State and Local Infrastructure*," menemukan bahwa, 57 % kota di AS tidak mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan perbaikan atas siklus hidup dari suatu proyek infrastruktur atau belanja modal. Kamensky juga menggaris bawahi bahwa manajer publik atau kepala daerah kalau di Indonesia, harus memahami lebih jauh biaya total belanja modal bukan hanya pengeluaran untuk konstruksi dan pengadaan saja, tetapi juga mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan perbaikan atas aset yang akan diperolehnya.

Bland dan Nunn (1992) juga menganalisis hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan, dalam makalahnya, "*The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets*", menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam proses pembuatan keputusan pengalokasian antara anggaran belanja modal dengan anggaran belanja pemeliharaan. Perbedaan tersebut terjadi karena sifat kedua belanja yang berbeda. Belanja modal adalah belanja variabel, yakni belanja yang terjadi karena adanya kebutuhan atau aktivitas untuk menghasilkan aset tetap, sementara belanja pemeliharaan bersifat rutin dari tahun ke tahun, sesuai dengan keadaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah.

BAB 3

GAMBARAN UMUM

3.1. Profil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

3.1.1. Demografi

Secara umum kondisi kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terletak pada ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan air laut, dengan topografi wilayah sekitar 75% daerah rawa-rawa dan perairan dan 25 % daratan. Dengan luas wilayah lebih kurang 19.023,5 kilometer persegi atau sekitar 1.902.311 hektar. Kabupaten OKI terletak pada 104°2' – 106°0' Bujur Timur (BT) dan 2°3'4"15" Lintang Selatan (LS).

Sementara wilayah administratifnya terdiri atas 18 kecamatan, 271 desa dan 10 kelurahan, dengan ibukota kabupaten Kayuagung. Adapun letak batas kabupaten ini :

Batas Utara	: Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin
Batas Selatan	: Kabupaten Lampung Timur
Batas Barat	: Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur
Batas Timur	: Selat Bangka

3.1.2. Kependudukan

a. Rasio Jenis Kelamin	: 104
b. Pertumbuhan penduduk	: 1,06%
c. Komposisi Penduduk	
0-14 tahun	: 32,24 %
15-64	: 63,52 %
d. IPM	: 65,65 (th 2002)
e. Jumlah KK Miskin	: 54.731 KK
f. Jumlah Penduduk Miskin	: 262.709 jiwa

3.1.3. Pendidikan

Keberadaan SDM sebagai subjek pembangunan adalah sangat penting, karena tanpa SDM yang berkualitas maka program pembangunan tak akan berjalan maksimal. Untuk tak terlepas dari upaya membangun infrastruktur pendidikan,

sehingga nantinya menciptakan manusia yang dapat mewujudkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan kabupaten OKI. Berikut gambaran pendidikan di Bumi Seguguk ini ;

a. Penduduk Buta Huruf	: 7,84 %
b. Penduduk tidak tamat SD	: 32,61%
c. Penduduk tamat SD	: 33,78 %
d. Penduduk tamat SMP	: 12,91 %
e. Penduduk tamat SMA	: 11,76 %
f. Penduduk tamat PT	: 1,1 %
g. Rata-rata lama sekolah	: 5,7 tahun
h. Rasio Guru murid SD/MI	: 1 banding 31
i. Rasio Guru murid SMP>MTS	: 1 banding 38
j. Rasio Guru murid SMA/MA/SMK	: 1 banding 36

3.1.4. Derajat Kesehatan

a. Angka Kematian bayi	: 43.4 / 1.000 kelahiran bayi
b. Angka Kematian Ibu	: 490,11 / 1.000 kelahiran hidup
c. Angka harapan hidup	: 66,45 tahun
d. Angka gizi buruk balita	: 0,3 %

3.1.5. Tenaga Kerja

a. Jumlah tenaga kerja 15 tahun ke atas	: 437.523 orang
b. Persentase angkatan kerja	: 48,41%
c. Persentase yang bekerja	: 51,21 %
d. Persentase setengah pengangguran	: 3,17 %
e. Tingkat pengangguran kentara	: 3,21 %
f. Pencari kerja (kartu kuning)	: 2.186 orang

3.1.6. Sumber Daya Alam

1. Pertambangan

- batubara cadangan tereka 325 juta ton, nilai kalori 4.500-5.000
- Pasir Kuarsa, cadangan tereka 96 s/d 99,18 %. berlokasi di desa sungai pasir kecamatan cengal dan sekitar kecamatan pematang panggang. Pemanfaatan

pasir kuarsa ini untuk bahan baku industry gelas, keramik, campuran cetakan dalam pengecoran. Sedangkan komposisi pasir kuarsa yang di daerah ini sebagai berikut :

SiO ₂	: 96 s/d 99,18%
K ₂ O	: 0,0005 s/d 0,5 %
Al ₂ O ₃	: 0,18 s/d 1,01 %
Na ₂ O	: 0,006 s/d 0,27 %
MgO	: 0,04 s/d 1,17 %
Na ₂ O	: 0,06 s/d 0,17 %
Fe ₂ O ₃	: 0,02 s/d 0,34 %
MnO ₂	: 0,0006 s/d 0,01 %

- c. Granit berpotensi sebesar 83,5 juta ton dari pasir besi kadar Fe sebesar 33,5% dan kadar SiO₂ sebesar 45,6%

2. Perikanan

Karena sebagian besar wilayah kabupaten OKI memiliki rawa-rawa sekitar 75 %, maka beberapa jenis usaha antara lain, budidaya dan perikanan tangkap di rawa, danau dan laut. Produksi perikanan dari tahun ke tahun tidak tentu kadang meningkat dan kadang menurun. Pada tahun 2003 produksinya sebesar 45.629 ton terdiri dari penangkapan laut 20.043 ton, penangkapan perairan umum sebesar 12.085,9 ton, budidaya air tawar sebesar 1.877,1 ton dan budidaya air payau sebesar 11.623 ton. Jenis ikan yang berada di perairan kabupaten ini jenisnya antara lain, sepat siam, tebakang, lampam, patina tau juaro, betook dan gabus. Di perairan laut seperti manyung, gulamah, pari, bawal, parang-parang, kembung. Kemudian budidaya air tawar patin dan emas. Budidaya air payau yaitu jenis udang windu yang berada di daerah wahyu mandira.

3. Perkebunan

Perkebunan yang telah dan sedang digalakkan adalah perkebunan dengan komoditi unggulan berupa perkebunan sawit dan karet. Perkebunan besar karet seluas 15.928 hektar dengan perkiraan produksi 5.253 ton per tahun, sedangkan perkebunan besar sawit seluas 71.973,06 hektar dengan perkiraan produksi sebesar 785.337,69 ton per tahun.

Untuk luas perkebunan rakyat, jenis komoditi karet seluas 54.490,25 hektar dengan perkiraan produksi 51.041,42 ton per tahun, sedangkan jenis komoditi sawit rakyat seluas 1.045,75 hektar dengan produksi perkiraan sebesar 1.492,5 ton per tahun.

4. Peternakan

Peternakan yang ada di kabupaten OKI adalah peternakan rakyat seperti sapi potong sebanyak 97.427 ekor per tahun. Untuk kerbau sebanyak 17.230 ekor per tahun, ayam buras sekitar 2.048.544 ekor, ayam ras sekitar 371.175 ekor dan itik sebanyak 355.268 ekor per tahun. Sedangkan produksi ayam pedaging sekitar 23.302 ton dan ayam buras sebanyak 152.305 ton per tahun.

Peternakan besar yang ada, yaitu peternakan sapi berproduksi sekitar 1.476 ton per tahun, kambing sebanyak 18.260 ekor, kerbau sebanyak 173 ton, domba sebanyak 225.115 ton dan babi sebanyak 61.020 ton per tahun.

3.1.7. Budaya

Kehidupan bermasyarakat di kabupaten OKI berjalan relative lancar dengan masyarakat yang heterogen, namun rasa kebersamaan yang tinggi. Heterogenitas ini disepakati lebih merupakan sumber kekayaan budaya daerah daripada unsure pembeda antar kelompok, etnis, ras, suku dan agama. Agama sebagai salah satu unsure untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah kabupaten OKI memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam membina kerukunan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan sikap toleransi yang tinggi serta saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Untuk tahun 2003 jumlah penduduk yang beragama islam sebanyak 642.019 jiwa, beragama katolik sebanyak 1.765 jiwa, beragama protestan sebanyak 444 jiwa, beragama hindu sebanyak 645 jiwa, dan yang menganut agama budha sebanyak 222 jiwa.

3.1.8. Pariwisata

Potensi kekayaan alam kabupaten ogan komering ilir tidak hanya terbatas pada potensi pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan saja, namun memiliki juga di sector pariwisata, yakni danau teluk gelam. Keberadaan danau teluk gelam ini hanya berjarak sekitar 40 km dari kayuagung sebagai pusat

ibukota kabupaten. Keberadaan danau tersebut sudah diakui secara nasional, karena telah dipercaya menjadi salah satu tempat pelaksanaan beberapa cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI 2004. Untuk mendukung daya pikat wisatawan, pemerintah kabupaten OKI telah membangun hotel dan rumah makan di pinggir danau tersebut.

3.1.9. Keamanan

Kondisi keamanan di kabupaten OKI bisa dikategorikan relatif kondusif, dengan ditandai stabilitas masyarakat yang cukup stabil dan tidak ada gejolak yang mengkhawatirkan. Kerukunan beragama juga berjalan dengan baik, dimana tak pernah ada konflik berunsur SARA. Etnis dan ragam bahasa serta budaya tak pernah menjadi kendala dalam melakukan interaksi sosial, sehingga tatanan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik.

3.1.10. Aksesabilitas

1. Kondisi Jalan

Tabel 3.1.
Kondisi Jalan Kabupaten OKI
Tahun 2006

Jalan & Jembatan	Baik	Sedang	Rusak Berat	Total	Rasio dgn Luas Daerah (%)
Nasional					
Jalan (km)	71,5	41	-	112,5	0,59
Jembatan (m2)	-	-	-	-	-
Propinsi					
Jalan (km)	46	21	-	67	0,35
Jembatan (m2)	-	-	-	-	-
Kabupaten					
Jalan aspal (km)	146	125	88,9	360,8	1,9
Jalan berbatu (km)	9	26,2	20,2	55,4	0,29
Jalan tanah (km)	7	728,5	183,6	919	4,83
Jalan Beton (km)	154,5	-	-	154,5	-
Jembatan Besi (m2)	-	1.324,65	-	1.324,65	-
Jembatan Kayu (m2)	-	-	168	168	-
Jembatan Rangka Baja (m2)	141	-	-	141	-
Jembatan Box Culvert (m2)	415,5	-	-	415,5	-

Sumber : Bappeda OKI (2006)

2. Kondisi Sungai

Di daerah kabupaten OKI memiliki sungai besar sebanyak tiga yaitu sungai ogan, sungai komering dan sungai Mesuji. Juga terdapat 18 anak sungai atau sungai kecil. Kondisi anak sungai keci banyak mengalami pendangkalan dan penyempitan alur sehingga pada waktu musim kemarau dating tidak bisa dilayari sebagai jalur transportasi sungai.

3.2. Profil Belanja Modal Kabupaten OKI

3.2.1. Kenaikan Tertinggi Belanja Modal

Belanja modal (*capital expenditure*) kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengalami pasang surut. Kenaikan terbesar selama masa penelitian terjadi pada tahun anggaran 2004 dengan kenaikan sebesar 43,23% atau naik menjadi Rp. 130 milyar. Sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 1,70% atau menjadi Rp. 241 milyar.

Tabel 3.2.
Perkembangan Belanja Modal
(Rp juta)

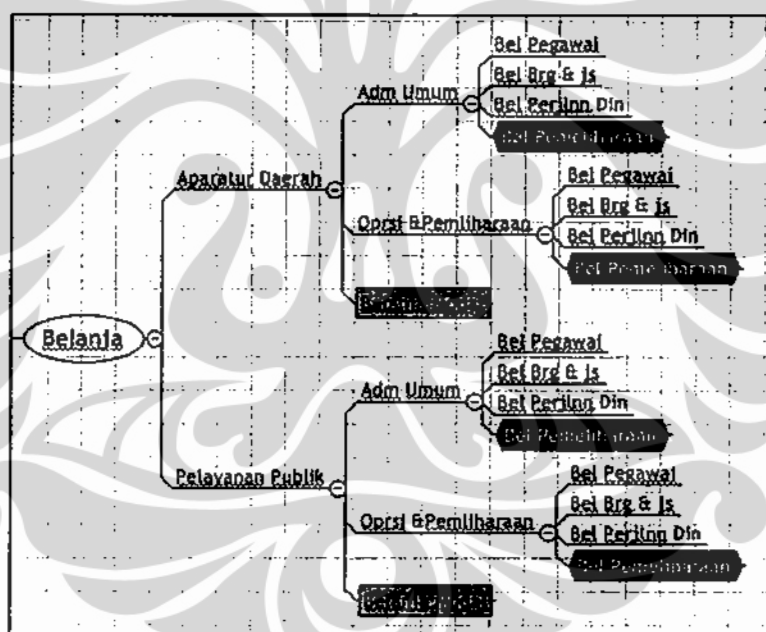
Tahun	Belanja Modal	Kenaikan (%)
2003	90,886	-
2004	130,174	43.23
2005	149,367	14.74
2006	201,171	34.68
2007	236,701	17.66
2008	240,734	1.70
2009	249,223	3.53
Rata-rata Pertumbuhan		19,26

Sumber : Bagian Keuangan (data diolah)

Pada tahun 2002 ini, departemen dalam negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tanggal 10 juni 2002. Mulai tahun ini, pemerintah kabupaten

OKI langsung merespon Kepmendagri tersebut untuk mengimplementasikannya. Karena arah penyempurnaan keuangan pemerintah Kabupaten OKI sudah dirancang tahun sebelumnya, maka dengan cepat tahun itu juga APBD sudah dapat menyesuaikan dengan Kepmendagri tersebut. Walaupun banyak menemui kendala teknis seperti kesiapan SDM masing-masing dinas/kantor/badan dan instansi yang masih banyak belum paham system dan prosedur keuangan yang baru sehingga tim yang penyempurnaan keuangan terus mensosialisasikan sambil mengimplementasikan kepmendagri tersebut, yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Bagian Keuangan, bagian hukum, bagian perlengkapan yang ada di sekretariat daerah, juga tim asistensi dari BPKP wilayah Sumsel.

Gambar 3.1.
Struktur Belanja Daerah
Menurut Kepmendagri 29 Tahun 2002



Sumber : Kepmendagri 29 Tahun 2002 (diolah)

Perkembangan yang cukup signifikan pada tahun 2004 ini yakni sebesar 43,23 %, ini diduga karena baru penyesuaian dengan system keuangan yang baru. Semula hanya mengenal APBD belanja rutin dan belanja pembangunan, sekarang harus dipisahkan belanja aparatur dengan belanja pelayanan public. Itupun masih harus diklasifikasikan lagi dengan belanja administrasi umum, belanja operasi & pemeliharaan, dan belanja modal. Ketiga jenis belanja ini pun ada pada belanja

aparatur dan belanja pelayanan public. Jadi pengelola keuangan di dinas / kantor/ bagian/ badan dan instansi pemerintah lainnya, harus memahami secara detail perbedaan ketiga jenis belanja tersebut mana yang masuk kategori belanja aparatur dan belanja pelayanan public. Di samping itu juga, kalau sebelumnya belanja modal seperti komputer, notebook dan asset-aset kecil lain yang masa ekonomisnya lebih dari satu tahun bisa masuk ke dalam suatu kegiatan apapun sehingga dalam proses pengklasifikasian ke dalam belanja modal menjadi melonjak tajam.

Penulis pun, selama melakukan penelitian dan pemisahan untuk mencari belanja modal pada tahun-tahun sebelumnya dalam hal ini tahun 2003 dan 2004 hanya melihat judul kegiatannya saja. Sehingga tidak mungkin memasukkan kegiatan pelatihan dan sosialisasi misalnya, dikelompokkan ke dalam belanja modal. Walaupun di dalam rincian kegiatannya ada belanja computer/notebook, printer dan lainnya, yang sebenarnya masuk kategori belanja modal. Karena keterbatasan data dan waktu yang panjang untuk melakukan itu, maka penulis hanya melihat judul kegiatannya saja yang menjadi landasan dalam mengkategorikan ke dalam belanja modal. Dengan demikian sangat wajar kalau pada tahun anggaran 2004 belanja modal menjadi naik tajam sebesar 43.23 % atau senilai Rp. 130 milyar.

Di samping itu juga penulis menemukan ada penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, misalnya belanja pendidikan dan beasiswa, ternyata bila dilihat dalam rincian pertanggung jawaban keuangannya, berbeda antara judul dan isinya, bisa saja dialokasikan untuk bantuan social masyarakat dan lainnya, walaupun dengan jumlah nilai keuangan sama. Pemeriksaan oleh internal dan pun tidak efektif, sementara BPKP tidak mengecek secara keseluruhan satu per satu tiap jenis belanja, hanya mengambil sampel per dinas/kantor/badan saja. Sehingga kadang-kadang ini luput dari mata pemeriksa keuangan.

3.2.2. Kenaikan Terendah Belanja Modal

Kenaikan terendah belanja modal ini terjadi pada tahun 2008 yaitu pertumbuhan sebesar 1,70 % atau menjadi Rp 241 milyar dari Rp. 236 milyar. Sejalan dengan itu, masih ingat bahwa Pekan Olahraga Nasional XVI-2004 (PON XVI-2004) PON diselenggarakan di Propinsi Sumatera Selatan mulai tanggal 2

sampai dengan 14 september 2004 dengan 39 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir di tempati sebagai penyelenggara Lomba Sky Air dan Lomba Dayung bertempat di Danau Teluk Gelam. Sehingga mulai tahun anggaran 2003 dan 2004 penataan, pembangunan dan perbaikan dilakukan pada Danau teluk gelam ini, mulai dari membangun mess dan peralatannya untuk peserta lomba dayung dan sky air, anjungan, peralatan lomba sky air dan dayung, pembangunan hotel kembar teluk gelam, pembangunan dan pengerasan jalan di lokasi danau teluk gelam, pembangunan jaringan listrik, air dan telepon, dan seterusnya yang berkaitan dengan perlombaan dayung dan sky air. Kalau dicermati lagi dua tahun anggaran 2003 dan 2004, belanja modal terus mengalami peningkatan, yakni 2003 naik sebesar 29 % dan 2004 naik sebesar 43 %. Ini karena untuk memenuhi target fasilitas yang sesuai dengan standar pertandingan PON XVI-2004 yang pelaksanaannya di bulan September 2004.

Di tahun yang sama 2004, di kabupaten OKI ini juga mengalami pergantian kepemimpinan kepala daerah yaitu periode 2004 – 2009. Sehingga pada tahun anggaran 2005, belanja modal untuk pembangunan danau teluk gelam yang menggunakan dana cukup besar, untuk sementara dihentikan dan difokuskan ke sasaran pembangunan infrastruktur pembangunan lainnya, yang tertera dalam dokumen pembangunan jangka menengah 2004 – 2009.

Dalam dokumen pembangunan menyebutkan bahwa, salah satu sasaran utama membangun jaringan transportasi terpadu, darat dan sungai yang diharapkan akan memperlancar hubungan antar wilayah. Mengingat kondisi geografis daerah ini yang 75% daerah rawa dan 25% daratan. Program peningkatan jaringan transportasi terpadu menjadi keharusan. Program tersebut :

1. Peningkatan jalan Kayuagng-Sepucuk-Wahyu Mandira
2. Pembangunan jembatan Ulak Depati dan jembatan pampangan
3. Peningkatan jembatan kayu menjadi jembatan beton
4. Pengembangan angkutan sungai
5. Peningkatan jalan Riding-Air Sugihan
6. Pembangunan jalan Tulung Selapan – Simpang Tiga – Sungai Lumpur
7. Pembangunan terminal terpadu celikah

Secara umum, program tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni, 1) peningkatan Prasarana, 2) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas, dan 3) Peningkatan Pelayanan Transportasi.

Pertama, Peningkatan Prasarana. Kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada ditingkatkan kelasnya, termasuk peningkatan prasarana transportasi sungai, terutama di sekitar pantai timur, karena di sana tidak ada prasarana jalan. Transportasinya menggunakan angkutan sungai berupa perahu, speedboat, dan motor jukung. Juga dilakukan pengerukan dan pembersihan alur sungai di daerah tersebut.

Kedua, peningkatan keselamatan lalu lintas. Program keselamatan lalu lintas baik di jalan maupun di sungai, dilakukan pembangunan pengadaan / pemasangan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) seperti rambu-rambu jalan, maupun sungai, traffic light, warning light, guard rail dsb.

Ketiga, Peningkatan pelayanan transportasi. Membangun terminal terpadu tipe A di Kota Kayuagung. Kemudian merencanakan pembangunan terminal tipe kecil (tipe C) di sejumlah daerah kecamatan seperti Tugumulyo, Mesuji, Pampangan, Pematang Panggang, Tulung Selapan, dan daerah lainnya yang dianggap perlu. Untuk pelayanan transportasi sungai, juga dibangun pelabuhan sungai, khususnya di pantai timur seperti Mesuji, Simpang Tiga, Desa Jungkal, Sukadarma dan Sungai Lumpur. Sungai Lumpur sebagai pusat kegiatan perekonomian daerah pantai timur yang semakin berkembang, namun belum memiliki pelabuhan sungai yang memadai. Selama ini kapal nelayan dan pedagang berlabuh dan bertambat di tiang rumah-rumah penduduk. Sedangkan untuk meningkatkan mutu uji kendaraan bermotor, direncanakan membangun Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Mekanis, mengingat pengujian yang dilakukan saat ini bersifat manual.

Bila kita bandingkan dengan data keuangan yang ada di table 3.3. di bawah, nampak bahwa belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan selama dua tahun yaitu 2003 dan 2004, menduduki urutan pertama untuk jalan, irigasi dan jaringan sedangkan belanja modal gedung dan bangunan selalu urutan kedua. Hal ini mendukung apa yang dijelaskan tersebut di atas.

Berkaitan dengan program jangka menengah pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2004-2009, yang salah satu bidangnya adalah Pembangunan Jaringan Transportasi Terpadu, hal ini didukung dengan data keuangan yang penulis dapatkan yang dapat dilihat di table 3.3. di bawah ini.

Belanja modal Jalan, irigasi dan jaringan selalu menduduki urutan teratas komposisinya diantara belanja modal lainnya selama tahun 2003 sampai dengan 2009.

Tabel 3.3.
Persentase Komposisi Belanja Modal
2003-2009

Belanja Modal	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Belanja Tanah	7.25	7.15	8.15	18.32	1.81	1.18	0.90
Belanja Peralatan & mesin	10.00	10.75	11.46	15.86	15.65	6.73	5.71
Belanja Gedung & Bangunan	35.00	37.86	10.75	14.74	16.20	10.31	8.19
Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	42.75	48.11	64.25	45.81	65.19	81.49	84.93
Belanja Aset Tetap Lain	5.00	5.12	5.39	5.26	1.15	0.29	0.27
	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. OKI & Dinas PKAD Kab. OKI (data diolah)

3.3. Profil Belanja Pemeliharaan Kabupaten OKI

Untuk melihat perkembangan belanja pemeliharaan di kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2003 sampai dengan 2009 dapat dilihat dalam table 3.4. di bawah ini. Pertumbuhan belanja pemeliharaan tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 53,17 % sehingga menjadi Rp. 54,4 milyar dari Rp 35,5 milyar di tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan terendah belanja pemeliharaan terjadi pada tahun 2009 sebesar 4,27 % atau menjadi Rp. 102 milyar dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 98 milyar. Rata-rata pertumbuhan selama 7 tahun penelitian tumbuh sebesar 25,58 % per tahun.

Seiring dengan perubahan peraturan dan system pengelolaan keuangan daerah, belanja pemeliharaan juga mengalami hal yang sama. Perubahan belanja pemeliharaan sebelum kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 terdapat ada di setiap dinas/kantor/badan dan instansi pemerintahan lainnya. Sementara setelah

diberlakukannya Kepmendagri tersebut belanja pemeliharaan mulai disinkronisasikan dengan akun belanja modal. Ini nampak dengan mulai diinventarisasi kembali asset-aset daerah yang ada di setiap dinas/kantor/badan dan instansi lainnya. Belanja pemeliharaan sekarang termasuk ke dalam kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan public. Untuk melihat dengan jelas posisi belanja pemeliharaan dapat dilihat gambar 3.1. di atas.

Tabel 3.4.
Perkembangan Belanja Pemeliharaan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
(Rp juta)

Tahun	Belanja Pemeliharaan	kenaikan (%)
2003	27,457	-
2004	35,523	29.38
2005	54,411	53.17
2006	75,547	38.85
2007	85,547	13.24
2008	98,041	14.61
2009	102,223	4.27
Rata-rata Pertumbuhan		25,58

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. OKI & Dinas PKAD Kab. OKI (data diolah)

Sedangkan setelah adanya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dan menteri dalam negeri menindaklanjuti PP tersebut dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja pemeliharaan di kategorikan ke dalam kelompok belanja barang dan jasa.

Belanja dalam permendagri ini di kelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal. Sementara belanja pemeliharaan masuk dalam kategori belanja barang dan jasa.

Untuk pengalokasian belanja pemeliharaan di daerah ini, hanya memperkirakan saja dari tahun-tahun sebelumnya atau dengan metode *actual expenditure* (Nakajima, 1989)

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Metode Penelitian

Sebagaimana tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui gambaran praktek pengelolaan belanja modal dan dampaknya terhadap belanja pemeliharaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, maka metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang dipilih dalam penelitian ini, didasarkan pada data-data yang sifatnya kuantitatif seperti data anggaran belanja modal, belanja pemeliharaan, dan asset daerah serta data lainnya.

Untuk mengeksplorasi praktek pengelolaan keuangan belanja modal dan belanja pemeliharaan secara lebih obyektif dan komprehensif, penulis menggali data dengan membandingkan, mengecek dan mengkolaborasikan kebenaran data-data tersebut dengan metode akumulasi penyusutan dan data jumlah asset yang kondisinya siap digunakan. Sementara pendekatan kualitatif sebagai metode pendukung, penulis menghubungkan dokumen-dokumen pembangunan yang berkaitan rencana pembangunan yang berhubungan dengan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

Dari aspek metodologisnya, penelitian dalam tesis ini menggunakan logika induktif, yaitu logika yang diawali dari temuan di lapangan untuk kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan, sehingga penelitian ini tidak bertujuan menguji teori melainkan menganalisa realitas dan membandingkannya dengan teori yang sudah ada.

4.2. Desain Penelitian

Di atas sudah dijelaskan tentang metode penelitian pendekatan kuantitatif yang didukung pendekatan kualitatif yang digunakan dalam tesis ini beserta ciri khasnya. Namun, dalam penelitian kuantitatif tersebut terdapat desain yang berbeda-beda yang dapat digunakan sesuai tujuan dan karakteristik penelitian yang dilakukan.

Oleh karena penelitian ini adalah upaya menganalisis tentang hubungan belanja modal dan dampaknya terhadap belanja pemeliharaan di lembaga

pemerintahan, maka desain penelitian yang penulis anggap paling cocok untuk digunakan adalah desain studi kasus. Merriam (1988) dan Yin (1989) dalam Creswell (2002) menjelaskan, dalam studi kasus peneliti menggali kesatuan atau fenomena tunggal (“kasus”) yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas (program, kejadian, proses, institusi, atau kelompok sosial) dan mengumpulkan informasi rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang lama.

Dengan desain ini penulis menggali informasi tentang hubungan belanja modal terhadap belanja pemeliharaan dengan prosedur pengumpulan data berupa pengamatan dan studi dokumentasi, untuk mengetahui bagaimana belanja modal dan belanja pemeliharaan tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang mendukung penelitian dalam tesis ini diperoleh dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan prosedur penelitian kuantitatif. Diawali dengan tahap studi kepustakaan untuk mendapatkan gambaran awal tentang Belanja Modal dan hubungannya terhadap Belanja Pemeliharaan serta informasi awal tentang belanja tersebut di kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari gambaran dan informasi awal ini, ditetapkanlah batas-batas penelitian berupa rumusan fokus dan pertanyaan penelitian serta kerangka analisisnya, selain itu dipersiapkan juga pokok pengamatan yang akan digunakan dalam studi lapangan.

Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu studi lapangan, meliputi pengamatan di lokasi penelitian dan studi dokumentasi yang dilakukan di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah data serta di dinas lain yang berhubungan.

4.4. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat maka data diambil langsung dari sumber data dengan kata lain datanya bersifat *first hand*.

Sumber data penelitian diambil dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebab data belanja modal dan pemeliharaan setiap dinas / kantor dan badan terdapat di institusi tersebut. Adapun dinas / kantor dan badan di Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 13 dinas, 4 badan dan 6 kantor sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Perikanan dan Peternakan
7. Dinas Perindustrian & Perdagangan
8. Dinas Ketahanan Pangan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11. Dinas Kehutanan
12. Dinas Perkebunan
13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14. Badan Pengawas Daerah
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17. Badan Kepegawaian Daerah
18. Kantor Polisi Pamong Praja
19. Kantor Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup
20. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
21. Kantor Transmigrasi
22. Kantor Informasi
23. Kantor Pemberdayaan Perempuan

4.5. Keterbatasan Penelitian

Sebagai sebuah upaya manusiawi, penelitian ini tentunya terkendala oleh keterbatasan-keterbatasan yang ada. Mengingat fenomena belanja modal dan

belanja pemeliharaan yang penerapannya di Indonesia baru dilakukan penataan kembali, sehingga peraturan dan pedoman tentang pengelolaan belanja ini belum stabil dan belum sempurna. Sementara penulis hanya meneliti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karenanya penelitian ini tidak bisa digeneralisasi ke semua kabupaten/kota di Indonesia.

4.6. Analisis Data

Peneliti yang menggunakan riset kuantitatif dan menggunakan uji statistik. Hal tersebut tidak menjamin hasilnya valid, karena mungkin ada kesalahan dalam pengambilan data atau dalam pengumpulan data. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis bersamaan dalam proses pengumpulan data selanjutnya. Data yang sudah diperoleh direduksi dengan cara dicatat ulang, dikelompokkan, atau diringkas, kemudian diolah dengan program *evIEWS* 4.1. dengan menggunakan model ekonometrika.

Model ekonometrika yang terbentuk adalah model *correlation matrix* dan data series yang diolah dengan menggunakan alat bantu berupa program pengolah data *evIEWS* 4.1. Pengolahan data dilakukan dengan metode perbandingan nilai korelasi antar variabel bebas terhadap variabel terikat, kemudian hasilnya diuji dengan menggunakan kriteria ekonomi dan kriteria statistik.

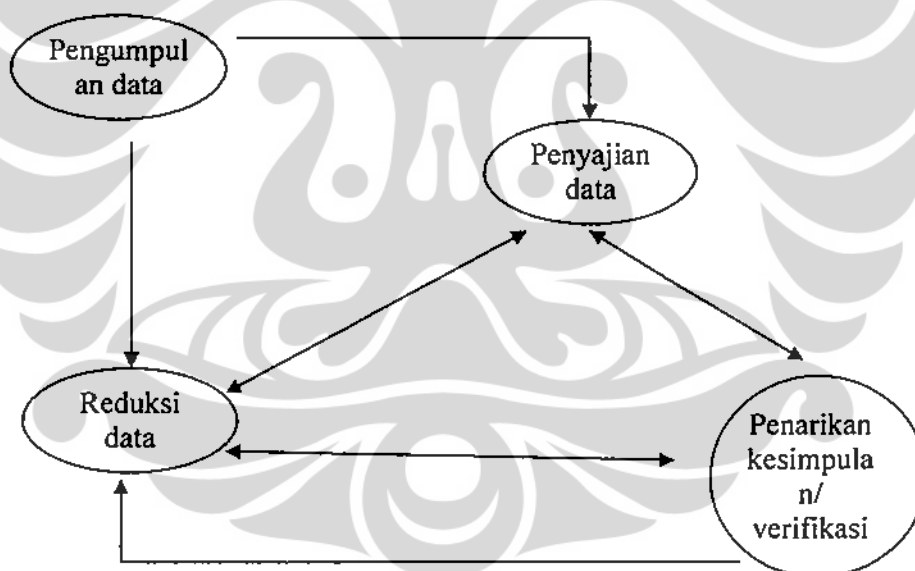
Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah belanja modal yang diukur dengan melihat jumlah realisasi anggaran belanja modal tahun 2003-2008, dan untuk tahun 2009 menggunakan data anggaran perubahan 2009. Untuk variabel bebas (*independent variable*) adalah belanja pemeliharaan, yang juga diukur dengan melihat jumlah realisasi anggaran belanja pemeliharaan.

Karena jumlah populasi yang kurang dari 30, maka alat analisis ini hanya menggunakan *correlation matrix*. Koefisien korelasi (r) merepresentasikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 sampai dengan +1. Nilai korelasi (r) bernilai mendekati +1 atau -1 dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dan terikat memiliki hubungan linear kuat atau dapat dikatakan memiliki korelasi yang tinggi. Akan tetapi, bila r memiliki nilai mendekati nol, maka variabel bebas dan terikat memiliki hubungan linear yang lemah atau mungkin tidak ada hubungan sama sekali (Walpole. 1982).

Hasil pengujian tersebut, diverifikasi dengan fakta-fakta, dokumen-dokumen sehingga menghasilkan pertanyaan baru yang harus dicari kembali di lapangan, setelah kembali dari lapangan dan jawaban dari pertanyaan baru tersebut didapatkan maka prosedur tadi kembali dilakukan, data yang diperoleh direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan sementara, kemudian diverifikasi lagi. Demikian selanjutnya sampai penulis merasa kesimpulan yang didapat cukup memadai untuk menjawab fokus dan pertanyaan penelitian.

Model analisis data seperti ini oleh Miles dan Huberman (1992) menyebutkan bahwa, model interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam model interaktif ini, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Gambaran model interaktif ini adalah sebagai berikut :

Gambar. 4.1. Model Analisis Interaktif



BAB 5 PEMBAHASAN

5.1. Konsepsi Ekonometrika

Secara harfiah, ekonometrika diartikan pengukuran ekonomi yang menerapkan statistika matematika atas data ekonomi yang memberikan dukungan empiris terhadap model yang disusun berdasarkan ilmu ekonomi sehingga hasilnya berupa angka-angka (*numerical results*). Metode utama yang digunakan biasanya metode inferensia yang sesuai, korelasi merupakan salah satunya. Korelasi digunakan untuk mengetahui korelasi diantara variable satu dengan variable lainnya didasarkan pada nilai variable –variabel yang diamati. Analisis korelasi yang menjelaskan hubungan antar variable - variable yang diamati menunjukkan hubungan yang bersifat linear. Hasil koefisien korelasi menunjukkan tingkat hubungan antar variable - variable yang diteliti (Walpole. 1992).

Koefisien korelasi yang dilambangkan r , memiliki nilai antara -1 sampai dengan +1. Angka -1 dan +1 menunjukkan hubungan yang linear sempurna, sedangkan nilai nol berarti memiliki hubungan linear yang sangat lemah atau mungkin tidak memiliki hubungan sama sekali. Angka mendekati -1 atau +1 mencerminkan bahwa antar variable yang diamati memiliki korelasi yang kuat atau hubungannya sangat tinggi.

Dalam melakukan uji terhadap hasil koefisien korelasi antar variabel, menggunakan kriteria 2 (dua) yakni, kriteria ekonomi dan kriteria statistic. Pertama, Pemenuhan kriteria ekonomi dilakukan dengan memperhatikan tanda hasil koefisien korelasi yang diperoleh setelah diolah dengan alat bantu Program Komputer Eviews 4.1. Apabila koefisien korelasi memiliki tanda positif / kemiringan positif, berarti variable yang diamati memiliki hubungan yang searah. Peningkatan variable satu akan menimbulkan peningkatan pada variable yang lain. Sebaliknya, bila nilai koefisien korelasi bertanda negatif / kemiringan negative, berarti memiliki korelasi yang berlawanan atau hubungannya tidak searah. Artinya, peningkatan variable satu akan menimbulkan penurunan pada variable yang lain.

Kedua, pemenuhan criteria statistik dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi antar variable yang diteliti, yakni belanja modal dan belanja pemeliharaan. Yang akan diuji itu adalah Belanja modal satu tahun sebelum terhadap belanja pemeliharaan. Hasilnya akan dibandingkan dengan hasil koefisien korelasi antara belanja pemeliharaan dengan belanja modal dua sebelumnya. Kemudian akan dibandingkan juga dengan hasil koefisien korelasi antara belanja pemeliharaan dengan belanja modal 3 tahun sebelumnya. Atau dengan kata lain untuk membuktikan hasil koefisien korelasi yang terbaik antara belanja modal time lag ke-n dengan belanja pemeliharaan tahun t.

Metode penghitungan koefisien korelasi secara teori adalah satu per satu, yakni menghitung koefisien korelasi antara BP dengan BM, kemudian koefisien korelasi antara BP dengan BM_{t-1} , dan koefisien korelasi antara BP dengan BM_{t-2} . Hasil penghitungan kedua koefisien korelasi secara terpisah tersebut, dicari nilai koefisien korelasi yang terbaik. Hasilnya, akan terlihat hanya dengan membandingkan koefisien korelasi masing-masing penghitungan tadi. Namun, dengan bantuan program computer Eviews hal ini bisa teratasi hanya dengan memasukkan data BP, BM, BM_{t-1} , dan BM_{t-2} , maka matrik hasil koefisien korelasi dapat dilihat dengan cepat.

Dengan demikian, hasil perbandingan tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan hasil koefisien korelasi yang dihasilkan oleh program Eviews dalam bentuk matrik di table 5.1. di bawah ini.

5.2. Hasil Pengolahan Koefisien Korelasi

Berdasarkan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa belanja modal memiliki hubungan yang searah dengan belanja pemeliharaan pada tahun berikutnya. Artinya perubahan belanja modal akan mempengaruhi atau berdampak pada perubahan belanja pemeliharaan pada tahun-tahun mendatang. Apakah tahun pertama, tahun kedua atau tahun ketiga, tergantung dari jenis belanja modal itu sendiri. Oleh sebab itu akan disajikan matrik nilai koefisien korelasi antara belanja pemeliharaan dengan belanja modal di bawah ini.

Tabel 5.1. Matrik Hasil Koefisien Korelasi
Antara BP dengan BM, BM_{t-1} dan BM_{t-2}

	BP	BM	BM_{t-1}	BM_{t-2}
BP	1.00	0.93	0.94	0.90
BM	0.93	1.00	0.87	0.77
BM_{t-1}	0.94	0.87	1.00	0.86
BM_{t-2}	0.90	0.77	0.86	1.00

Keterangan :

BP = Belanja Pemeliharaan

BM = Belanja Modal tahun berjalan

BM_{t-1} = Belanja Modal time lag-1

BM_{t-2} = Belanja Modal time lag-2

Tabel Matrik Hasil Koefisien Korelasi di atas, menunjukkan nilai korelasi antar variabel yang diamati. Koefisien korelasi antara BP dengan BM tahun berjalan sebesar 0,93, koefisien korelasi BP dengan BM setahun sebelum atau time lag-1 sebesar 0,94, koefisien korelasi BP dengan BM dua tahun sebelum atau time lag-2 sebesar 0,90.

Selanjutnya pengujian terhadap hasil pengolahan koefisien korelasi menggunakan kriteria ekonomi dan kriteria statistik

a. Kriteria Ekonomi

Tanda Koefisien korelasi dari table matrik antara variabel Belanja Pemeliharaan (BP) dengan Belanja Modal (BM_{t-1}) atau *time lag t-1*, menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,94. Ini artinya, bahwa hubungan antara variabel Belanja Pemeliharaan (BP) dengan variabel Belanja Modal (BM) telah sesuai dengan teori yang dibahas pada bab sebelumnya.

b. Kriteria statistik

Hasil pengujian dengan melihat nilai range nilai yang disyaratkan yaitu antara -1 sampai dengan +1. Tabel matrik hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa nilai koefisien semua variabel masuk dalam range -1 sampai dengan +1. Nilai koefisien korelasi terendah terdapat pada variabel

Belanja Pemeliharaan dengan variabel BM tahun kedua atau time lag-2, yakni sebesar 0,90. Sedangkan nilai tertinggi koefisien korelasi berada pada matrik antara variabel BP dengan BM dengan time lag-1, yakni sebesar 0,94.

5.2.1. Kesimpulan Hasil Koefisien Korelasi Terbaik

Dari hasil pengolahan koefisien korelasi antara variabel belanja pemeliharaan dengan belanja modal, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi yang terbaik adalah koefisien korelasi antara variabel belanja pemeliharaan (BP) dengan variabel belanja modal time lag-1 (BM_{t-1}) yang sebesar 0,94. Sementara nilai koefisien korelasi BM dan BM_{t-2} terhadap Belanja Pemeliharaan (BP) masing-masing menunjukkan nilai yaitu 0,93 dan 0,90 atau nilai koefisiennya lebih rendah dibanding dengan BM_{t-1} terhadap BP. Dengan demikian, hasil terbaik koefisien korelasinya adalah korelasi antara BM_{t-1} dengan BP yang sebesar 0,94. Selanjutnya hasil koefisien korelasi terbaik inilah yang akan diamati lebih mendalam di samping hasil koefisien korelasi lainnya dalam penelitian ini.

5.3. Analisis Hasil Koefisien Korelasi

5.3.1. Analisis Belanja Modal

Tabel 5.1. matrik hasil koefisien korelasi di atas, menunjukkan bahwa, koefisien korelasi antara Belanja Modal (BM) baik BM_{t-1} maupun BM_{t-2} dengan Belanja Pemeliharaan (BP) menunjukkan nilai yang tinggi yakni masing-masing sebesar 0,94 dan 0,90 selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, atau dengan kata lain bahwa BP memiliki hubungan yang kuat dengan BM_{t-1} dan BM_{t-2} . Artinya, bahwa Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berpengaruh sangat kuat terhadap Belanja Pemeliharaan di tahun anggaran ke depan. Sedangkan koefisien korelasi tertinggi yakni 0,94 adalah antara BP dengan BM_{t-1} . Ini berarti bahwa, Belanja Modal satu tahun sebelum (BM dengan time lag-1) memiliki hubungan yang paling kuat dibandingkan Belanja Modal dengan time lag-2 (atau 2 tahun ke belakang). Ini juga menunjukkan bahwa belanja modal satu tahun sebelum berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan di tahun berjalan.

Sebelum melihat lebih jauh tentang BM_{t-1} dan BM_{t-2} atau belanja modal time lag-1 dan time lag-2, terlebih dahulu penulis ingin memaparkan perkembangan belanja modal rentang waktu 2003 dan 2009.

Perkembangan Belanja modal seperti yang ditunjukkan dalam tabel 5.2, terlihat bahwa belanja modal terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya dengan jumlah kenaikan yang relatif naik turun, walaupun kecenderungannya mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 19,26% per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2004 yang sebesar 43,23 % dibanding tahun sebelumnya atau naik menjadi Rp 130 milyar. Sementara kenaikan terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 1,70 % atau naik sebesar Rp. 4 milyar dan menjadi Rp. 240 milyar di tahun 2008.

Tabel 5.2. Perkembangan Belanja Modal
Kabupaten Ogan Komering Ilir
(Rp. juta)

Tahun	Belanja Modal	Kenaikan (%)
2003	90,886	-
2004	130,174	43.23
2005	149,367	14.74
2006	201,171	34.68
2007	236,701	17.66
2008	240,734	1.70
2009	249,223	3.53
Jumlah	1.298.256	Rata-rata 19,26

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. OKI
& Dinas PKAD Kabupaten OKI (Diolah)

Kenaikan tertinggi belanja modal terjadi pada tahun 2004 yakni sebesar 43,23 % dan menjadi sebesar Rp. 130 milyar. Kita ketahui bahwa pada tahun 2004, di kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat peristiwa penting yakni proses pergantian kepemimpinan Kepala Daerah periode 2004 - 2009. Praktis mulai awal anggaran 2004 sudah menyesuaikan dengan visi dan misi kepemimpinan yang baru periode 2004 – 2009. Sebab pelantikannya tepat diawal Januari 2004. Bupati

yang baru ini dengan latar belakang teknik sipil dan konsep pembangunannya yang memfokuskan pada pembangunan infrastruktur sangat besar.

Memang, kalau diperhatikan bahwa pada tahun tersebut terasa masa transisi kepemimpinan, yakni terjadi pergantian kepemimpinan politik periode 2004 – 2009. Sesuai dengan dokumen pembangunan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 2004-2009, terdapat arah pembangunan yang cukup konsisten terutama pengembangan infrastruktur jalan, irigasi, jaringan, gedung, bangunan, peralatan dan mesin. Nampak dalam tabel 5.3. dan table 5.4. di bawah ini.

Tabel 5.3. Komposisi Belanja Modal
Tahun 2003 – 2009
(Rp. juta)

Belanja Modal	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah
Belanja Tanah	9.360	9.307	9.957	36.854	4.284	2.768	2.352	74.883
Belanja Peralatan & mesin	12.911	13.994	14.000	31.906	37.044	15.784	14.922	140.560
Belanja Gedung & Bangunan	45.189	37.581	13.133	29.653	38.346	24.180	21.403	209.484
Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	55.195	62.627	78.492	92.156	154.306	191.122	221.945	855.842
Belanja Aset Tetap Lain	6.456	6.665	6.585	10.582	2.722	680	706	34.395
Jumah	129.110	130.174	122.167	201.171	236.701	234.534	261.326	1.298.256

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. OKI & Dinas PKAD Kab. OKI (data diolah)

Menelusuri lebih jauh lagi tentang belanja modal, yakni berdasarkan jenis belanja modal seperti belanja modal tanah, belanja modal gedung & bangunan, belanja modal mesin & peralatan, belanja modal Jalan, irigasi & jaringan, dan belanja modal lainnya, seperti yang tertera dalam tabel 5.3. Dalam table 5.4. tersebut tampak bahwa, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan menduduki urutan yang pertama selama rentang waktu penelitian atau persentase komposisinya antara 42,75% sampai 84,93% dibandingkan dengan belanja modal lainnya. Bila Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dalam beberapa tahun (2003-2009) dibandingkan, maka persentase komposisi belanja modal jalan, irigasi & jaringan terendah terjadi di tahun 2003 yakni sebesar 42,75%, sedangkan yang tertinggi komposisinya adalah di tahun 2009 yang sebesar 84,93%. Total

belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama 2003-2009 juga tampak menduduki urutan pertama dengan jumlah sekitar Rp. 856 milyar.

Urutan kedua persentase komposisi belanja modal adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan persentase komposisi antara 8,19% sampai 35%. Kalau dilihat jumlah belanja ini selama 2003-2009 sebesar Rp 209 milyar. Disusul oleh Belanja Modal Mesin dan Peralatan diurutan ketiga dengan persentase komposisi antara 5,71% sampai 15,86 % dengan jumlah selama 2003-2009 sebesar Rp. 140 milyar.

Tabel 5.4
Persentase Komposisi dan Urutan Belanja Modal
Tahun 2003-2009

Belanja Modal	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Belanja Tanah	7.25 ^{IV}	7.15 ^{IV}	8.15 ^{IV}	18.32 ^{II}	1.81 ^{IV}	1.18 ^{IV}	0.90 ^{IV}
Belanja Peralatan & mesin	10.00 ^{III}	10.75 ^{III}	11.46 ^{II}	15.86 ^{III}	15.65 ^{III}	6.73 ^{III}	5.71 ^{III}
Belanja Gedung & Bangunan	35.00 ^{II}	28.87 ^{II}	10.75 ^{III}	14.74 ^{IV}	16.20 ^{II}	10.31 ^{II}	8.19 ^{II}
Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	42.75 ^I	48.11 ^I	64.25 ^I	45.81 ^I	65.19 ^I	81.49 ^I	84.93 ^I
Belanja Aset Tetap Lain	5.00 ^V	5.12 ^V	5.39 ^V	5.26 ^V	1.15 ^V	0.29 ^V	0.27 ^V
	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. OKI & Dinas PKAD Kab. OKI (data diolah)

Keterangan : I = urutan pertama
II = urutan kedua
III = urutan ketiga
IV = urutan keempat
V = urutan kelima

Dokumen yang berupa buku berjudul "Gagasan Pembangunan OKI Menuju Kesejahteraan" yang diterbitkan oleh Humas Pemkab. OKI menyebutkan bahwa, membangun jaringan transportasi terpadu, darat dan sungai yang diharapkan akan memperlancar hubungan antar wilayah. Mengingat kondisi geografis daerah ini yang 75% daerah rawa dan 25% daratan. Program peningkatan jaringan transportasi terpadu menjadi keharusan. Program tersebut :

1. Peningkatan jalan Kayuagung-Sepucuk-Wahyu Mandira
2. Pembangunan jembatan Ulak Depati dan jembatan pampangan
3. Peningkatan jembatan kayu menjadi jembatan beton

4. Pengembangan angkutan sungai
5. Peningkatan jalan Riding-Air Sugihan
6. Pembangunan jalan Tulung Selapan – Simpang Tiga – Sungai Lumpur
7. Pembangunan terminal terpadu celikah

Secara umum, program tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni, 1) peningkatan Prasarana, 2) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas, dan 3) Peningkatan Pelayanan Transportasi.

Pertama, Peningkatan Prasarana. Kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada ditingkatkan kelasnya, termasuk peningkatan prasarana transportasi sungai, terutama di sekitar pantai timur, karena di sana tidak ada prasarana jalan. Transportasinya menggunakan angkutan sungai berupa perahu, speedboat, dan motor jukung. Juga dilakukan pengerukan dan pembersihan alur sungai di daerah tersebut.

Kedua, peningkatan keselamatan lalu lintas. Program keselamatan lalu lintas baik di jalan maupun di sungai, dilakukan pembangunan pengadaan / pemasangan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) seperti rambu-rambu jalan, maupun sungai, traffic light, warning light, guard rail dsb.

Ketiga, Peningkatan pelayanan transportasi. Membangun terminal terpadu tipe A di Kota Kayuagung. Kemudian merencanakan pembangunan terminal tipe kecil (tipe C) di sejumlah daerah kecamatan seperti Tugumulyo, Mesuji, Pampangan, Pematang Panggang, Tulung Selapan, dan daerah lainnya yang dianggap perlu. Untuk pelayanan transportasi sungai, juga dibangun pelabuhan sungai, khususnya di pantai timur seperti Mesuji, Simpang Tiga, Desa Jungkal, Sukadarma dan Sungai Lumpur. Sungai Lumpur sebagai pusat kegiatan perekonomian daerah pantai timur yang semakin berkembang, namun belum memiliki pelabuhan sungai yang memadai. Selama ini kapal nelayan dan pedagang berlabuh dan bertambat di tiang rumah-rumah penduduk. Sedangkan untuk meningkatkan mutu uji kendaraan bermotor, direncanakan membangun Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Mekanis, mengingat pengujian yang dilakukan saat ini bersifat manual.

Sejalan dengan kenaikan tertinggi belanja modal yang terjadi pada tahun 2004, dan kita masih ingat bahwa Pekan Olahraga Nasional XVI-2004 (PON

XVI-2004) PON diselenggarakan di Propinsi Sumatera Selatan mulai tanggal 2 sampai dengan 14 september 2004 dengan 39 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir di tempati sebagai penyelenggara Lomba Sky Air dan Lomba Dayung bertempat di Danau Teluk Gelam. Sehingga mulai tahun anggaran 2003 dan 2004 penataan, pembangunan dan perbaikan dilakukan pada Danau teluk gelam ini, mulai dari membangun mess peserta & panitia lomba, peralatan lomba dayung dan sky air, anjungan, pembangunan hotel kembar teluk gelam, pembangunan dan pengerasan jalan di lokasi danau teluk gelam, pembangunan jaringan listrik, air dan telepon, dan seterusnya yang berkaitan dengan perlombaan dayung dan sky air. Kalau dicermati lagi dua tahun anggaran 2003 dan 2004, belanja modal terus mengalami peningkatan, yakni 2003 naik sebesar 29 % dan 2004 naik sebesar 43 %. Ini karena untuk memenuhi target fasilitas yang sesuai dengan standar pertandingan PON XVI-2004 yang pelaksanaannya di bulan September 2004

Dengan demikian sangat wajar bila pada tahun 2004, belanja modal mengalami peningkatan yang tertinggi, dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah yang tertinggi dibanding belanja modal lainnya, disusul belanja gedung dan bangunan.

Memang sangat disayangkan, penulis tidak memperoleh data yang lebih rinci lagi karena kendala teknis dan waktu yang terbatas, terutama data tentang rincian dinas/instansi yang termasuk ke dalam sub kelompok belanja modal apa. Sehingga penulis tidak bisa menelusuri lebih lanjut tentang dinas/instansi mana yang melaksanakan sub belanja modal tanah misalnya. Oleh sebab itu, ke depan bila ada penelitian yang sama tentang belanja modal ini, alangkah lebih baiknya menelusuri sampai ke dinas dan instansi yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas rincian sub belanja modal, yang mengklasifikasikan belanja per item sub belanja modal yang terdiri atas 5 sub bagian belanja modal, yakni ; belanja modal tanah, belanja modal gedung & bangunan, belanja modal mesin & peralatan, belanja modal Jalan, irigasi & jaringan, dan belanja modal asset tetap lainnya. Karena hal ini nanti akan dihubungkan dengan belanja pemeliharaan di setiap sub kelompok jenis belanja modal tersebut. Kerangka analisis seperti ini

lebih tepat untuk mengetahui relevansi antara sub belanja modal dengan belanja pemeliharaan yang digunakan untuk sub belanja modal yang terkait.

5.3.2. Analisis Belanja Pemeliharaan

Table 5.5. Perkembangan Belanja Pemeliharaan, memperlihatkan bahwa belanja pemeliharaan terus mengalami kenaikan dengan jumlah kenaikan yang relatif naik dan turun. Tetapi kecenderungannya terus meningkat dengan rata-rata selama masa penelitian meningkat sekitar 25,58% per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2005 sebesar 53,17 % atau menjadi Rp. 54 milyar. Sedangkan pertumbuhan terendah di tahun 2009 yang naik sebesar 4,27% atau menjadi Rp. 102 milyar.

Tabel 5.5. Perkembangan Belanja Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2003 – 2009
(Rp. juta)

Tahun	Belanja Pemeliharaan	Kenaikan (%)
2003	27,457	-
2004	35,523	29.38
2005	54,411	53.17
2006	75,547	38.85
2007	85,547	13.24
2008	98,041	14.61
2009	102,223	4.27
Rata-rata Pertumbuhan		25,58

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. OKI & Dinas PKAD Kab. OKI (data diolah)

Bila dibandingkan pertumbuhan belanja pemeliharaan ini dengan pertumbuhan belanja modal, maka akan tampak bahwa belanja pemeliharaan trend kenaikannya mengikuti trend pertumbuhan belanja modal dengan selisih waktu 1 (satu) ke depan. Kecenderungan trend pertumbuhan belanja pemeliharaan sesuai dengan matrik hasil koefisien korelasi antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan, yang nilai koefisiennya sebesar 0,94 untuk koefisien BM_{t-1} dengan BP. Atau belanja modal setahun yang lalu memiliki hubungan yang robust dengan

belanja pemeliharaan saat ini. Hasil matrik koefisien korelasi ini memperkuat bahwa belanja modal berpengaruh kuat terhadap belanja pemeliharaan di tahun depan.

Tabel 5.6.
Perbandingan Kenaikan Belanja Modal dan Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2003 – 2009

Tahun	Kenaikan Belanja Modal (%)	Kenaikan Belanja Pemeliharaan (%)
2003	-	-
2004	43.23*	29.38
2005	14.74	53.17**
2006	34.68	38.85
2007	17.66	13.24
2008	1.70*	14.61
2009	3.53	4.27**

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. OKI & Dinas PKAD Kab. OKI (data diolah)

Keterangan :

- * = Kenaikan / Penurunan pada Belanja Modal
- ** = Kenaikan / Penurunan pada Belanja Pemeliharaan

Penemuan empiris ini, secara teori baik oleh Nakajima (1989), Kamensky (1984), Bland & Nunn (1992), Vogt (2007), Halim (2004), maupun Allen dan Tomassi (2001), menyatakan bahwa, belanja modal akan berdampak pada belanja pemeliharaan karena dengan adanya belanja modal akan menimbulkan adanya asset baru, yang tentu asset baru tersebut perlu dilakukan pemeliharaan setiap tahunnya. Alokasi belanja pemeliharaan ini tentu akan muncul pada setiap tahun anggaran sesuai dengan jenis asetnya. Kita lihat misalnya Kenaikan belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 43,23 %, sementara kalau kita perhatikan setahun kemudian yakni tahun 2005, belanja pemeliharaan pertumbuhannya meningkat sebesar 53,17 %. Begitupun juga, bila kita perhatikan pertumbuhan belanja modal terendah terjadi pada tahun 2008, dan kita lihat pertumbuhan belanja pemeliharaan di tahun 2009, juga mengalami pertumbuhan yang relatif kecil yakni sebesar 4,27%.

Perbandingan antara pertumbuhan belanja modal dengan belanja pemeliharaan yang trend-nya cenderung sama tersebut, mengindikasikan dan dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengalokasian belanja modal telah mempertimbangkan belanja pemeliharaan di tahun anggaran setahun kemudian. Walaupun demikian, perlu digali lebih jauh tentang proses pengalokasian belanja pemeliharaan, sudahkan pengalokasiannya secara efisien dan efektif. Untuk melihat lebih lanjut apakah Belanja Pemeliharaan dialokasikan, diimplementasikan dengan baik dapat dilihat salah satunya adalah besaran alokasi belanja pemeliharaan. Besaran alokasi belanja pemeliharaan dapat dialokasikan dengan merujuk biaya akumulasi penyusutan aset tetap yang diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan, terutama PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Bulletin Teknis Akuntansi Penyusutan nomor 05 Desember 2007.

Dalam Bulletin teknis tersebut menyatakan bahwa untuk dapat menerapkan akumulasi penyusutan aset tetap ada tiga prasyarat yaitu :

a. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

b. Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi factor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan. Sebelum penerapan SAP, entitas

pemerintah mencatat nilai aset tetap dengan pengukuran yang berbeda dengan berbagai acuan. Dengan berlakunya SAP maka penilaian aset tetap harus disesuaikan dengan pedoman yang diatur dalam Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal. Nilai wajar yang sesuai dengan SAP akan menjadi dasar dalam menentukan nilai aset tetap yang dapat disusutkan.

Di lingkungan pemerintah, aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya, dengan kedua alasan ini, maka nilai sisa/residu tersebut diabaikan dalam menghitung penyusutan. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).

c. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unitmanfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indicator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang masa manfaatnya. Masa manfaat ini secara teknis akan bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya. Oleh karena sifat fisiknya dan kerentanannya terhadap perubahan teknologi, misalnya perangkat komputer, akan dianggap memiliki masa manfaat yang lebih pendek daripada gedung dan bangunan. Intensitas dan cara

pemakaian bus pegawai dibandingkan dengan lemari pajangan misalnya, akan mengarahkan pada anggapan bahwa masa manfaat bus pegawai lebih pendek daripada masa manfaat lemari pajangan.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan indikator total unit manfaat potensial, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang total unit manfaat potensial. Manfaat aset dengan indikator manfaat yang spesifik ini secara teknis akan bergantung pada karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya juga. Pada kelompok aset tetap, misalnya peralatan dan mesin, mungkin akan dijumpai bahwa intensitas pemanfaatan kendaraan yang diukur dalam jarak perjalanan yang ditempuh, berbeda satu sama lain. Jumlah jarak yang ditempuh oleh bus pegawai, misalnya akan berbeda dari jarak yang ditempuh oleh mobil dinas kepala kantor.

Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda. Dalam hal ini, masa manfaat akan menjadi dasar perhitungan penyusutan.

Intensitas pemanfaatan aset akan mempengaruhi pemilihan metode penyusutan unit produksi. Dalam hal ini, intensitas pemanfaatan akan diukur dengan unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan. Pada gilirannya, unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan ini akan dibandingkan dengan seluruh potensi kapasitas/produksi yang dikandung oleh suatu aset tetap.

Hanya dengan terpenuhinya ketiga prasyarat di atas, penyusutan dapat dihitung. Tanpa prasyarat pertama, maka kedua prasyarat terakhir menjadi tidak relevan. Sedangkan perhitungan tiap metode penyusutan memang membutuhkan kuantifikasi prasyarat kedua dan ketiga. Hal ini tampak dari rumusan perhitungan

Bukti lain yang dapat ditelusuri untuk membuktikan bahwa pengelolaan belanja pemeliharaan dilaksanakan dengan baik adalah dengan melihat kondisi akhir asset dengan melihat hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP yang bisa penulis peroleh hanya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang memberikan layanan dasar public. Laporan tersebut

dapat menceritakan seberapa jauh belanja pemeliharaan diimplementasikan dengan baik.

Lihat saja misalnya asset, sarana dan prasarana di bidang kesehatan yang merupakan layanan dasar public, yang mesti disediakan oleh pemerintah, kondisinya sangat memprihatinkan. Data fasilitas kesehatan menceritakan bahwa belanja pemeliharaan tidak diimplementasikan dengan baik.

Tabel. 5.7.
Data Fasilitas Kesehatan
Kabupaten OKI tahun 2006

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Persentase Baik
1.	Puskesmas	20	55 %
	- Kondisi baik	11	
	- Kondisi rusak	9	
2.	Puskesmas Pembantu	88	42%
	- Kondisi baik	37	
	- Kondisi rusak	51	
3.	Puskesmas Keliling	11	55%
	- Kondisi baik	6	
	- Kondisi rusak	5	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2006 (data diolah)

Coba kita bayangkan fasilitas puskesmas pembantu yang biasanya ada di daerah-daerah terpencil, yang dalam kondisi baik dan layak pakai hanya 42% dari jumlah yang ada 88 unit puskesmas pembantu. Belum lagi kalau dilihat di bidang layanan dasar public yang lain seperti pendidikan. Juga memprihatinkan, sarana dan prasarana belajar seperti gedung dan ruang belajar hanya 49,13 persen yang kondisi baik dan layak pakai, belum lagi sarana penunjang proses pembelajaran seperti laboratorium dan perpustakaan.

Data empiris ini menceritakan kondisi bahwa implementasi belanja pemeliharaan tidak dikelola dengan tepat. Indikasi lain bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak dikelola dengan baik, yakni tidak terdapatnya biaya akumulasi penyusutan asset dalam neraca daerah sampai tahun anggaran 2009, yang sebenarnya dapat dijadikan acuan dalam menentukan alokasi belanja pemeliharaan.

Sebelum menelusuri lebih jauh lagi tentang proses pengalokasian belanja pemeliharaan, beberapa peraturan yang tentang pengelolaan keuangan daerah

yang berdampak pada pengelolaan belanja pemeliharaan dapat dijelaskan di bawah ini. Sehingga kenapa belanja pemeliharaan dalam proses pengalokasiannya seperti dijelaskan tersebut di atas .

Peraturan pengelolaan keuangan daerah mulai Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah, sebagai tindak lanjut dari PP 24 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang kemudian direvisi terakhir dengan PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kepmendagri 29 tahun 2002 tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa belanja pemeliharaan harus dialokasikan berdasarkan estimasi atas kondisi keseluruhan asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Bahkan, dalam peraturan ini memiliki dua jenis belanja, yaitu belanja administrasi umum (BAU) dan belanja operasional dan pemeliharaan (BOP), yang di dalam kedua jenis belanja tersebut terdapat jenis belanja pemeliharaan. BAU bersifat rutin atau terjadi terus menerus dan BOP merupakan kegiatan temporer. Dalam kepmendagri ini juga tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan biaya pemeliharaan yang terdapat di BAU dan BOP, maupun cara pengalokasian jenis belanja pemeliharaan ini.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, juga tidak dijelaskan secara tegas tentang pengelolaan biaya pemeliharaan, walaupun sudah lebih baik dalam pengelompokkannya, yakni dimasukkan ke dalam kelompok belanja barang dan jasa di satu akun. Untuk pengalokasian belanja pemeliharaan, masih tetap sama dengan peraturan sebelumnya.

Dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan belanja modal agak lebih baik, karena sudah mengakomodasi penerapan prinsip harga perolehan dalam aktiva tetap. Ini akan memberikan jalan lebih lanjut dalam penerapan sistem akumulasi penyusutan asset sehingga biaya pemeliharaan dapat diterapkan dalam proses

penyempurnaan peraturan pengelolaan keuangan daerah selanjutnya, walaupun jalannya masih panjang.

Kondisi tersebut di atas, juga terjadi di era tahun 1980an di sebagian besar kota-kota yang menjadi anggota *National League of Cities*, Kamensky (1984) menemukan sebanyak 57% kota-kota di AS tidak mempertimbang biaya pemeliharaan dan perbaikan atas umur teknis asset.

Karo-karo (2006) juga melakukan penelitian atas belanja modal dan belanja pemeliharaan. Ia menemukan bahwa, tidak terdapat hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Ia menggunakan sampel kabupaten/kota di Pulau Jawa untuk tahun anggaran 2003-2004. Ia juga menemukan bahwa ketika pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran belanja modal, ternyata tidak diimbangi dengan pengalokasian anggaran untuk belanja pemeliharaan dan operasional. Diduga hal ini disebabkan karena tidak akuratnya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran terhadap kegiatan atau proyek belanja modal.

Dari table 5.4 terdapat perkembangan belanja pemeliharaan terutama tahun 2005 yang meningkat sebesar 53.17 %. Sementara kalau kita cermati keadaan sarana dan prasarana layanan dasar kesehatan terdapat hal yang bertentang. Di sisi lain anggaran belanja pemeliharaan meningkat tajam (53,17%) sementara di sisi yang lain lagi, keadaan sarana dan prasarana layanan dasar tersebut kondisinya memprihatinkan (lihat table 5.5). Ini menjadi pertanyaan besar, jangan-jangan tesis Paolo Mauro (1998) tentang "*Corruption and The Composition of Government Expenditure*", telah terjadi di daerah ini. Mauro menyatakan bahwa, tipe pengeluaran pemerintah mendorong terjadinya suap. Ini disebabkan pertama, rendahnya tingkat kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Kedua, kesulitan memastikan nilai yang tepat terhadap barang dan jasa dengan spesifikasi khusus dan memerlukan teknologi tinggi.

Untuk hal pertama, rendahnya kompetisi yang rendah. Memang, hal ini masih nampak dalam pengadaan barang dan jasa yang ada di daerah ini. Terbukti penulis masih menemukan para preman yang menjaga. kantor/dinas/tempat pendaftaran pengadaan barang dan jasa. Sudah ditentukan siapa yang akan memperoleh proyek tersebut, sehingga kalau ada yang mendaftar ke panitia

pengadaan barang dan jasa, yang bukan dari kelompoknya. Maka, akan ditolak oleh preman. Panitia lelang pura-pura tidak tahu hal ini, sebagai penghindaran dari delik mempersulit calon peserta lelang.

Untuk hal yang kedua, Sulitnya menentukan nilai yang tepat atas barang dan jasa yang memiliki spesifikasi khusus dan berteknologi tinggi. Inipun masih terjadi di daerah ini. Penulis yang kebetulan juga bekerja di daerah ini, menemukan belanja modal yang memerlukan spesifikasi khusus misalnya pengadaan kendaraan pemadam kebakaran dan alat pemadam kebakaran di perairan. Penulis pernah mengecek harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh panitia, ternyata harga distributor lebih rendah 50% lebih dari HPS. Bayangkan, itu baru alat pemadam kebakaran, belum lagi peralatan medis yang canggih dan rumit.

5.3.3. Analisis Hubungan Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan

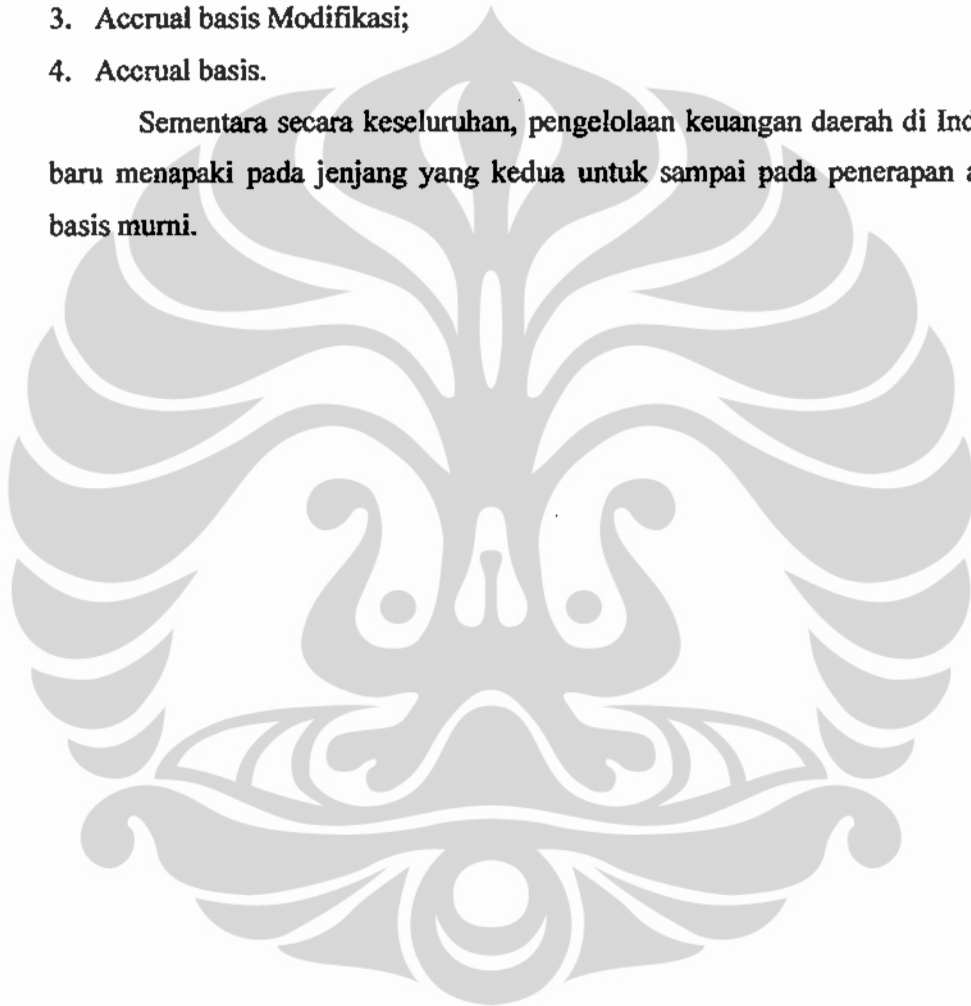
Dari hasil matrik koefisien korelasi yang memiliki *time lag* satu tahun yang sebesar 0,94 atau memiliki hubungan yang kuat/robust. Memang secara keuangan terbukti, belanja modal memiliki hubungan yang kuat terhadap belanja pemeliharaan setahun kemudian. Yang perlu ditelusuri lebih jauh adalah proses penentuan belanja pemeliharaan. Penelusuran penulis terhadap proses penentuan belanja pemeliharaan menunjukkan bahwa, belanja pemeliharaan ditentukan dengan perkiraan semata atas asset yang ada yang didasarkan pada kejadian yang berlangsung di tahun-tahun sebelumnya. Metode penentuan belanja pemeliharaan seperti ini oleh Nakajima (1989) disebut dengan metode estimasi berdasarkan *actual expenditure*. Metode estimasi ini dalam penentuan belanja pemeliharaan, estimasinya menyesuaikan dengan figure kenaikan atau penurunan tahun sebelumnya.

Sementara kalau mengacu pada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), metode yang disarankan adalah metode depresiasi/penyusutan asset sebagaimana yang ada dalam PP 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan maupun dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) terutama PSAP nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Karena memang dalam Kerangka Kerja Penerapan Akuntansi Bebas *accrual*, dibutuhkan waktu yang panjang untuk menuju ke *accrual* basis murni. Allen dan Tomassi (2001) memberikan proses penerapan akuntansi sampai pada *accrual* basis murni, ada 4 (empat) tahapan yang harus dilalui satu per satu, yakni

1. Cash Basis;
2. Cash Basis Modifikasi;
3. *Accrual* basis Modifikasi;
4. *Accrual* basis.

Sementara secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah di Indonesia baru menapaki pada jenjang yang kedua untuk sampai pada penerapan *accrual* basis murni.



BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hubungan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan memiliki nilai korelasi sebesar 0,94 untuk BM time lag-1, 0,90 dan untuk BM time lag-2. Ini artinya bahwa semua Belanja modal baik time lag-1 dan time lag-2 memiliki hubungan yang kuat, atau Belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki korelasi yang tinggi.
- b. Belanja Modal (BM dengan time lag-1) memiliki koefisien terbaik disebabkan oleh karakteristik belanja modal yang memang secara teorinya memiliki belanja pemeliharaan setelah time lag-1. Belanja modal tersebut adalah jalan, irigasi dan jaringan. Jenis belanja ini merupakan belanja modal yang selama rentang waktu 2003 sampai dengan 2009 memiliki porsi terbesar yakni antara 42 % sampai dengan 84 % per tahun diantara belanja modal yang lainnya.
- c. Peningkatan belanja pemeliharaan tidak dilaksanakan secara penuh oleh dinas /instansi/kantor dan mengindikasikan penyimpangan, contoh layanan dasar public bidang kesehatan yang sarana dan prasarananya hanya 42% dalam kondisi baik (puskesmas pembantu) pada tahun 2006. Sarana dan prasarana layanan dasar pendidikan tahun 2006 hanya 49,13% yang dalam kondisi baik dan layak pakai. Padahal pada tahun sebelumnya (2005) anggaran belanja pemeliharaan naik sebesar 53,17 %.
- d. Metode Estimasi yang digunakan dalam penentuan alokasi belanja pemeliharaan adalah metode estimasi berdasarkan *actual expenditure*. Artinya besaran belanja pemeliharaan diestimasikan sesuai dengan figure kenaikan atau penurunan belanja asset tahun sebelumnya. Karena metode penghitungan akumulasi penyusutan seperti dalam SAP, belum dijalankan sepenuhnya akibat belum tegasnya aturan. Karena memang berkaitan erat

dengan sistem anggaran yang berbasiskan *accrual*. Sementara anggaran saat ini masih menganut sistem anggaran berbasis kas modifikasi, artinya laporan keuangan neraca dibuat berdasarkan *accrual* basis sedangkan laporan realisasi anggaran dibuat berdasarkan *cash* basis.

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat rangka kemungkinan pengembangan hasil penelitian lebih lanjut adalah :

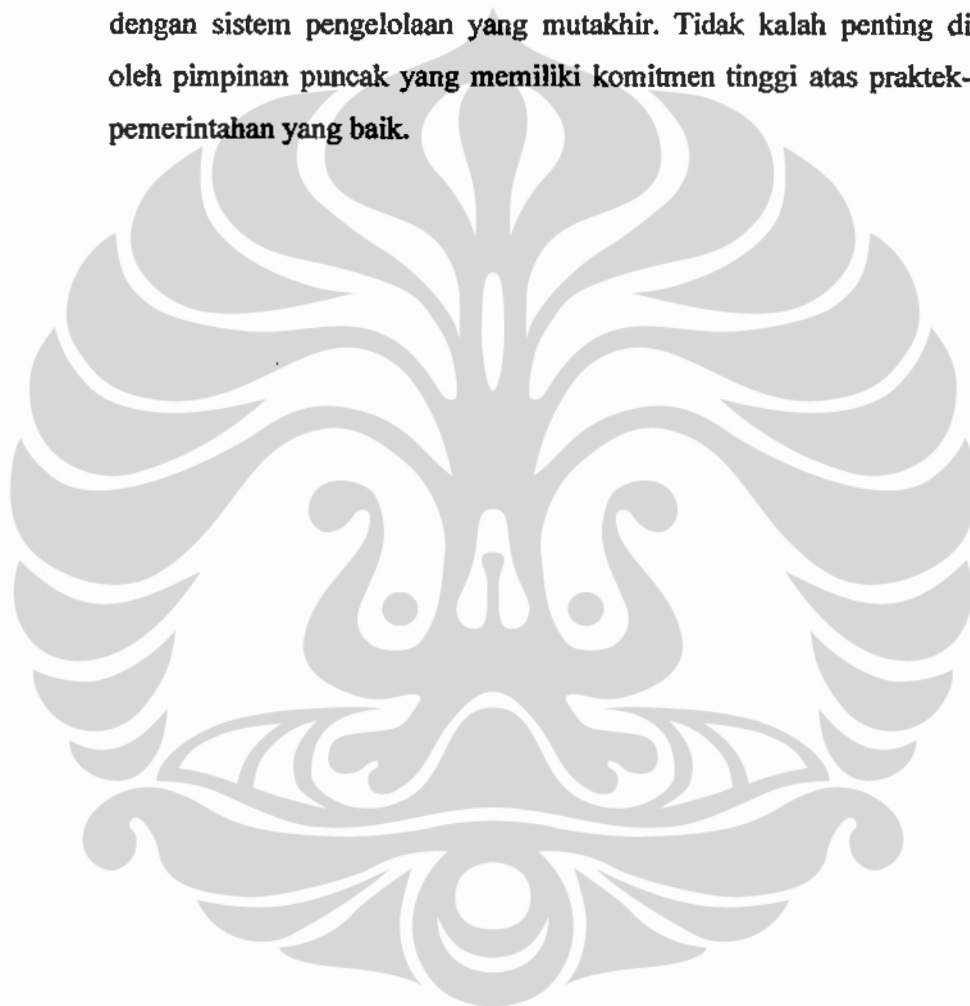
- a. Penelitian ini tidak memberikan gambaran secara rinci mengenai kegunaan belanja pemeliharaan untuk jenis barang / aset apa saja. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan analisis secara mendalam tentang kegunaan belanja pemeliharaan untuk barang/aset apa saja sehingga mengetahui secara detail hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan.
- b. Penelitian ini tidak memasukkan faktor jumlah aset karena aset yang tertera dalam neraca daerah keakuratannya diragukan karena, tidak menyertakan biaya akumulasi penyusutan aset, sehingga jumlah aset yang tertera menggelembung nilainya. Padahal dalam kenyataannya ada aset-aset yang nilainya berkurang. Ini karena memang sistem akuntansi keuangan yang ada belum mendukung penuh untuk ini. Sebaiknya, ke depan penelitian ini menggunakan faktor jumlah aset karena belanja pemeliharaan lebih dekat dengan jumlah yang harus dipelihara dan dipertahankan manfaatnya agar pelayanan publik tetap dilaksanakan secara baik dan sempurna.

Adapun saran dari penelitian ini terhadap pengambil kebijakan yang terkait dengan belanja modal dan belanja pemeliharaan, yaitu :

- a. Pemerintah daerah memperhatikan praktek-praktek pengelolaan belanja modal yang efisien dan efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi, termasuk biaya pemeliharaan dan operasional yang memadai. Dengan kata lain memperhatikan Konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) oleh Allen dan Tomassi (2001).
- b. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap implementasi belanja pemeliharaan, karena ada indikasi bahwa belanja

pemeliharaan tidak dilaksanakan secara baik sesuai dengan tujuan belanja pemeliharaan. Kondisi aset layanan dasar publik Dinas Kesehatan dan dinas Pendidikan menunjukkan hal ini.

- c. Pemerintah daerah agar mulai menerapkan konsep akuntansi penyusutan agar jumlah aset yang tertera dalam neraca menjadi realistis. Walaupun, penerapan ini butuh SDM yang paham akuntansi berbasis accrual dan didukung dengan sistem pengelolaan yang mutakhir. Tidak kalah penting didukung oleh pimpinan puncak yang memiliki komitmen tinggi atas praktek-praktek pemerintahan yang baik.



REFERENSI

- Abdullah, Sukry dan Halim. 2006. Studi belanja modal pada APBD. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2 No. 2 Tahun 2006. Jakarta.
- Allen, Ricaed & Daniel tomassi. 2001. Managing Public Expenditure ; A Reference Book for Transition Countries. Paris. SIGMA-OECD.
- Bland, Robert & Samuel Nunn. 1992. The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets. Public Budgeting & Finance (Summer).
- BS 3811. 1984. Glossary of maintenance management terms used terotechnology. HMSO. London
- BS 3811. 1993. Glossary of terms used in Terotechnology. British Standards Institution. Milton Keynes
- Creswell, John W. (2002). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition. Sage Publications. Thousand Oaks.
- Dikun, Suyono. 2003. Infrastruktur Indonesia : Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis. Jakarta; Kementerian Negara PPN/Bappenas RI.
- Gujarati, Damodar N.. 2003. Basic Econometrics. 4th. McGraw-Hill. New York.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta. Salemba Empat.
- Imron, Rustam. Bowo Leksono dan Bangun P. Lubis. 2006. Gagasan Pembangunan OKI Menuju Kesejahteraan. Humas Pemkab. OKI.
- Kamensky, John M. 1984. Budgeting for State and local infrastructure; Developing a Strategy. Public Budgeting and Finance. (Autumn).
- Karo, karo. 2006. Hubungan PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Daerah. Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Legianto. (1999, December 19). Tantangan dan Peluang Era Otonomi Daerah. Padang. Harian Umum Mimbar Minang.
- Miles, Matthew B. dan Huberman A. Michel (Terjemahan Rohani Rohidi). 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. UI Press.
- Mulyadi. 2003. Akuntansi Biaya. Edisi 6. Aditya Media. Yogyakarta.
- Mustajab. Mohammad. 2009. Infrastructure Investment in Indonesia Process and Impact. Dissertation Ph.D in Groningen University.
- Nachrowi, Nachrowi D. dan Hardius Usman. 2006. Ekometrika; Pendekatan Populer dan Praktis untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Lembaga Penerbit UI. Jakarta.
- Nakajima. 1989. TPM Development Program ; Implementing Total Productivity Maintenance. Productivity Press. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru. Jilid 1. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syahrudin. 2007. Reformasi Penganggaran Negara : Sebuah Paradigma

- Baru.SIDANG Pleno ISEI 19-20 Juli 2007. Balikpapan
- Shah, Anwar. 2007. Local Budgeting; Public Sector Governance and Accountability Series. The World Bank.
- Vogt, A. John. Local. 2007. Capital Budgeting. Washington DC. The World Bank
- Walpole, Ronald E.. 1982. Pengantar Statistika. Edisi ketiga. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
- PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Kabupaten OKI. 2002. Laporan Pertanggung-jawaban Akhir Anggaran 2002. Bagian Keuangan Setda Kabupaten OKI.
- Kabupaten OKI. 2003. Laporan Pertanggung-jawaban Akhir Anggaran 2003. Bagian Keuangan Setda Kabupaten OKI.
- Kabupaten OKI. 2004. Laporan Pertanggung-jawaban Akhir Anggaran 2004. Bagian Keuangan Setda Kabupaten OKI.
- Kabupaten OKI. 2005. Laporan Pertanggung-jawaban Akhir Anggaran 2005. Bagian Keuangan Setda Kabupaten OKI.
- Kabupaten OKI. 2006. Laporan Pertanggung-jawaban Akhir Anggaran 2006. Bagian Keuangan Setda Kabupaten OKI.
- Kabupaten OKI. 2007. Laporan Pertanggung-jawaban Akhir Anggaran 2007. Bagian Keuangan Setda Kabupaten OKI.

Kabupaten OKI. 2008. Laporan Pertanggung-jawaban Akhir Anggaran 2008. Bagian Keuangan Setda Kabupaten OKI.

Kabupaten OKI. 2009. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI.

Kabupaten OKI. 2009. Laporan Pertanggung-jawaban Semesteran Anggaran 2009. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI.

Dinas Kesehatan. 2006. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Dinas Kesehatan) Tahun 2006. Dinas Kesehatan Kabupaten OKI.

Dinas Pendidikan. 2006. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Dinas Pendidikan) Tahun 2006. Dinas Pendidikan Kabupaten OKI.

Tim KSAP. 2007. Buletin Teknis Interpretasi Pernyataan SAP Nomor 7 tentang Akuntansi Penyusutan. KSAP. Jakarta.

<http://www.indonesiaseoul.org/indonesia//rubrik/view.php?kat=7&id=193>
(diakses tanggal 2 januari 2010)

http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Raya_Lintas_Sumatera (diakses tanggal 2 januari 2010)

<http://regionalinvestment.com/sipid/id/displayprofil.php?ia=1602> (diakses tanggal 2 januari 2010)

<http://www.kaboki.go.id> (diakses tanggal 2 Juli 2009)

<http://www.cetak.kompas.com>

